

**USUL PENELITIAN
PEMBIAYAAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN BATCH 2**

*Kerjasama Penelitian Antara Program Studi Teknik Planologi Fakultas Teknik
Universitas Pasundan Dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis*



**ARAHAN PENINGKATAN KEMANDIRIAN
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN CIAMIS
(Studi Pasca Pemekaran dengan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran)**

Tim Peneliti :

Deden Syarifudin, ST., MT. (NIDN : 0430057604)
Aan Anwar Sihabudin, SH.,S.IP. M.Si. (NIDN : 0430077002)
Elin Herlina, S.Pd., MM. (NIDN : 0420057704)

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
Mei, 2015**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENDANAAN FAKULTAS TEKNIK UNPAS**

Judul Penelitian : **Arahan Peningkatan Kemandirian Pembiayaan
Pembangunan Kabupaten Ciamis**

Kode>Nama Rumpun Ilmu : **424 / Perencanaan Wilayah dan Kota**

Ketua Peneliti :

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Deden Syarifudin, ST., MT.
- b. NIDN : 0430057604
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli/Penata Muda IIIb
- d. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
- e. Nomor HP : 081572727482
- f. Alamat Surel (e-mail) : dden.syar@gmail.com
- g. Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan Bandung

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Aan Anwar Sihabudin, S.H., S.IP., M.Si.
- b. NIDN : 0430077002
- c. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Galuh Ciamis

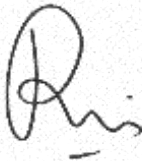
Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap : Elin Herlina, S.Pd., MM.
- b. NIDN : 0420057704
- c. Program Studi : Ilmu Manajemen
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Galuh Ciamis

Biaya Penelitian : - diusulkan ke FT Rp. 7.000.000,-
- dana FISIP Unigal Rp. 7.000.000,-
- *inkind* sebutkan #tujuh juta rupiah#

Bandung, 18 Desember 2015

Mengetahui,
Ketua Prodi PWK



Ir. Reza Martani Surdia, MT.
NIK. 15110323

Ketua peneliti



Deden Syarifudin, ST., MT.
NIDN. 0430057604

Mengetahui,
Dekan FT



(Dr. Ir. Yudi Garnida, MP)
NIP/NIK. 15110229

Lembaran Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan	v
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Sasaran Penelitian	2
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian	3
1.3.1 Tujuan	3
1.3.2 Sasaran	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
Bab II. Tinjauan Pustaka	5
2.1 Tinjauan Teori Kemandirian Pembiayaan Pembangunan	5
2.1.1 Pengertian Pembiayaan Pembangunan	5
2.1.2 Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan Kabupaten	5
2.1.3 Upaya Peningkatan Sumber-Sumber Pembiayaan Daerah	8
2.1.4 Pengertian Peningkatan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan	9
2.1.5 Kriteria Peningkatan Kemandirian	10
2.2 Tinjauan Kebijakan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan	11
Bab III. Metode Penelitian.....	13
3.1 Pendekatan Studi	13
3.2 Metode Pengumpulan data	13
3.3 Metode analisis	13
3.4 Alur Penelitian/ <i>Research Frame Work</i>	14
Bab III. Metode Penelitian	17
3.1 Pendekatan Studi	17
3.2 Metode Pengumpulan data	17
3.3 Metode analisis	18
3.4 Kompilasi dan Kegunaan Data	19
Bab IV. Pembahasan dan Hasil Penelitian	23
4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Ciamis	23
1.2 Pembahasan Dan Hasil Penelitian	48
Bab V. Simpulan dan Saran	64
5.1 Simpulan	64
5.2 Rekomendasi	65

DAFTAR PUSTAKA.....	vi
Lampiran 2 Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas.....	ix
Lampiran 3 Biodata ketua dan anggota.....	xi
Lampiran 4 Surat pernyataan kesanggupan pendanaan penelitian.....	xviii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Kemandirian Daerah	12
Tabel 2.2 Operasionalisasi Penelitian Dan Metoda Analisis	14
Tabel 3.1 Metode Analisis Kuantitatif	19
Tabel 3.2 Kompilasi Data Dan Kegunaan	20
Tabel 4.1 Kemiringan Lahan dan Satuan Morfologi	24
Tabel 4.2 Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan Dan Jumlah Kelurahan	25
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Dan Kepadatannya 4 Tahun Terakhir	28
Tabel 4.4 Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten/Kota	37
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan	39
Tabel 4.6 Jumlah Rumah Per Kecamatan	40
Tabel 4.7 Perbandingan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Penerimaan Daerah Tahun 2006-2013	49
Tabel 4.8 Perbandingan Antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Penerimaan Daerah Tahun 2009-2013	50
Tabel 4.9 Perbandingan antara Sumbangan Dari Pusat dengan Total Penerimaan Daerah Tahun 2009-2013	51
Tabel 4.10 Standar Kebutuhan Fiskal Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013	52
Tabel 4.11 Indeks Pelayanan Publik Per Kapita Kabupaten Ciamis Tahun 2009- 2013	53
Tabel 4.12 Kapasitas Fiskal Standar Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013	54
Tabel 4.13 Kapasitas Fiskal Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	55
Tabel 4.14 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Ciamis	55
Tabel 4.15 Upaya Fiskal Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	56
Tabel 4.16 Kemampuan Keuangan Per Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2013	58
Tabel 4.17 Variabel Derajat Kemandirian Kabupaten Ciamis Tahun 2006-2010.....	60
Tabel 4.18 Derajat Kemandirian Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013	61
Tabel 4.19 Potensi-Potensi Kegiatan Menurut RTRW Kabupaten Ciamis	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : <i>Research Frame Work</i> /Alur Penelitian	22
Gambar 4.1 Struktur Ruang Kabupaten Ciamis	35
Gambar 4.2 Pola Ruang Kabupaten Ciamis	36
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis	47

RINGKASAN

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji tentang peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan sebagai wujud desentralisasi pembangunan di Kabupaten Ciamis. Analisis yang digunakan yaitu kemampuan keuangan daerah yang meliputi desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya fiskal serta derajat kemandirian daerah. Potensi peningkatan kemandirian Kabupaten Ciamis yang meliputi potensi-potensi kegiatan menurut RTRW Kabupaten Ciamis, objek yang bisa digali untuk meningkatkan kemandirian, serta potensi peningkatan kemandirian berdasarkan pada kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

Kemandirian pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis termasuk kategori rendah sekali, karena sebagian besar berasal dari pemerintah pusat serta ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang cukup tinggi dan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan keuangannya sendiri pasca pemisahan terhadap Kabupaten Pangandaran. Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah Kabupaten Ciamis harus berupaya menggali dan meningkatkan sumber-sumber keuangan sendiri, dengan melihat potensi yang akan dikembangkan oleh setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Ciamis untuk mencapai tingkat kemandirian yang tinggi.

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis menggunakan Analisis manajemen keuangan dan justifikasinya menggunakan **Metoda AHP-SWOT** (*analitical hierarchycal proses-strangeness weakness opportunity treathness*) dengan cara penggabungan antara AHP dengan SWOT untuk menghasilkan arahan yang rekomendasikan bagi peningkatan PAD Kabupaten Ciamis.

Kata kunci: Arahan, Kemandirian Daerah, Daerah Otonomi Baru

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang tersirat dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan titik berat kepada pemerintah kabupaten/kota. Dalam meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor faktor produksi. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan. Peningkatan cakupan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat pula dilakukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi daerah (Musgrave & Musgrave, 1980;76).

Untuk melihat kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Beberapa variabel yang menunjukkan hal tersebut antara lain: kebutuhan fiskal (*fiscal need*), kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), upaya fiskal (*fiscal effort*), derajat desentralisasi fiskal, serta koefisien elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (Musgrave & Musgrave, 1980;77).

Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada Daerah itu nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari Daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil Daerah. Jika nantinya struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah kuat, boleh dikatakan Daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu struktur industri yang mantap beserta obyek pajak dan retribusi yang taat. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) dan berbagai bentuk transfer dari Pemerintah Pusat

seyogyanya hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Adisasmita, Raharjo. 2011;54).

Berdasarkan data BPS Kabupaten Ciamis 2013, untuk membiayai pembangunan, pemerintah di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2012 menghabiskan anggaran hampir 1,931 triliun rupiah seperti yang tercatat pada realisasi APBD Kabupaten Ciamis. Jumlah ini meningkat sebesar 20,69 persen dari APBD pada Tahun 2011. Dari total APBD Kabupaten Ciamis sebesar 1,931 triliun, PAD hanya menyumbang sebesar 0,088 triliun atau sekitar 4,56%, sementara DAU menyumbang sekitar 1,165 triliun rupiah atau sekitar 60,33%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan, dengan demikian pembiayaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Ciamis masih tergantung dari DAU. Kondisi ini masih dalam kondisi Kabupaten Ciamis (*build in region*), belum termasuk pemekaran dengan Kabupaten Pangandaran (*devided region*).

Permasalahan utama pada saat ini adalah pasca pemisahan diri Wilayah Selatan Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Pangandaran (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Ciamis akan mengalami kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 17 Milyar rupiah. Jumlah demikian adalah berasal dari kehilangan sejumlah sektor unggulan yaitu sektor pariwisata, perikanan tangkap, pajak bumi dan bangunan, retribusi dari 10 kecamatan layanan kesehatan. Pada tahun 2012 Kabupaten Ciamis menargetkan retribusi layanan kesehatan sebesar 4 Milyar dan tercapai sebesar 4,7 Milyar.

Kondisi ini dapat dipahami bahwa Kabupaten Ciamis masih pasca Kabupaten Pangandaran Menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru), Kabupaten Ciamis mengandalkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai pendapatannya diluar Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa derajat kemandirian fiskal Kabupaten Ciamis dianggap masih rendah, karena masih tergantung dari kontribusi pemerintah pusat. Dengan demikian sebagaimana diatas sangat penting melakukan analisis peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan dalam perspektif desentralisasi pembangunan di Kabupaten Ciamis.

1.2 Permasalahan Penelitian

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi terletak pada kesiapan dan kemampuan daerah untuk menerima beban dan tanggungjawab yang dimilikinya dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya, pemerintah daerah Kabupaten Ciamis pasca

Ciamis selatan memisahkan diri menjadi Kabupaten Pangandaran harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya melalui berbagai potensi yang dimiliki. Apabila tidak maka selain akan meningkatkan beban anggaran pemerintah pusat, otonomi yang diharapkan dapat menciptakan kemandirian tersebut akan sulit untuk dilaksanakan.

Adapun isu permasalahan mengenai tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis berdasarkan data BPS Kabupaten Ciamis tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut :

1. Sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti potensi pariwisata, potensi industri, potensi perdagangan dan jasa masih belum digali dan belum dikembangkan secara optimal sehingga pendapatan Kabupaten Ciamis masih tergantung pada pendapatan diluar Pendapatan Asli Daerah.
2. Bila melihat kemampuan keuangan Kabupaten Ciamis dari pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata per tahun kontribusi terhadap APBD 8,43%, ini berarti bahwa secara kemandirian fiskal Kabupaten Ciamis masih masuk dalam kategori rendah, karena pendapatan di luar PAD mencapai 91,57%, yaitu berasal dari dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah
3. Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah setiap tahunnya mengalami kenaikan, dimana untuk dana perimbangan rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar 9,52%, sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar 83,39%. Ini berarti bahwa Kabupaten Ciamis masih mengandalkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai pendapatannya diluar Pendapatan Asli Daerah.

Melihat permasalahan diatas, maka munculah suatu pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kemampuan keuangan daerah dan derajat kemandirian daerah untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Ciamis?
2. Objek dan potensi apa yang dapat digali untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Ciamis ?

3. Bagaimana arahan kebijakan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Ciamis?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan

Dengan melihat latar belakang dan rumusan permasalahan diatas maka tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan daerah dengan melihat kemampuan keuangan daerah dan derajat kemandirian di Kabupaten Ciamis dan menjelaskan potensi dan objek yang dapat digali untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis.

1.3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan diatas, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagaiberikut :

- Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan sebagai wujud desentralisasi pembangunan di Kabupaten Ciamis dengan cara mengukur kemampuan keuangan daerah dan derajat kemandirian daerah di Kabupaten Ciamis.
- Mengidentifikasi dan menganalisis potensi peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Ciamis yaitu dengan membagi antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan di Kabupaten Ciamis serta objek-objek yang bisa digali untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan Kabupaten Ciamis.
- Memberikan arahan kebijakan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Ciamis.

1.4 Luaran Penelitian

Adapun Luaran penelitian adalah :

- Penelitian ini merupakan produk dalam pengembangan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan, atau merupakan suatu model analog bagi kebijakan pembangunan daerah.
- Penelitian ini akan di publikasikan pada jurnal terakreditasi nasional periode Oktober 2015.

- Penelitian ini merupakan bahan ajar mata kuliah (mata kuliah ekonomi kota & regional di prodi perencanaan wilayah dan kota. Mata kuliah Kebijakan Pemerintahan, dan ekonomi pembangunan di Program Studi Ilmu Pemerintahan).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori Kemandirian Pembiayaan Pembangunan

2.1.1. Pengertian Pembiayaan Pembangunan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut pembiayaan neto dan jumlahnya harus dapat menutup defisit anggaran (Kunarjo, 2002:98).

Perencanaan pembangunan yang selama ini dianggap lebih efisien dalam pengaturan produksi dan distribusi, tidak luput pula dari kelemahan-kelemahan seperti perencanaan biasanya dianggap sangat kaku dan seolah-olah rencana yang telah dibuat merupakan pedoman umum yang harus diikuti, pelaksanaannya biasanya tidak sesuai dengan sasaran, karena adanya perubahan-perubahan eksternal yang tidak mampu diperhitungkan sebelumnya dan sebagainya serta negara yang sedang berkembang kurang mampu untuk menanggulangi masalah pembiayaan. Untuk melaksanakan suatu rencana, maka diperlukan pembiayaan yang memadai. Pembiayaan tersebut bukan saja dari sumber pemerintah, tetapi juga dari sumber masyarakat. Oleh karena itu, dapat melakukan pembiayaan pembangunan menurut apa yang telah direncanakan, diperlukan peningkatan sumber-sumber dana dan menggunakannya secara lebih efisien (Kunarjo, 2002:98).

2.1.2 Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan Kabupaten

Pembangunan daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah (APBD dan APBN) dan yang bersumber dari masyarakat. (Kunarjo, 2002:99)

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibiayai oleh pemerintah pusat sebagai pelaksana asas desentralisasi dan pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. (Kunarjo, 2002:99)

Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi biayai atas beban APBD. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi atau tugas pembantuan merupakan

penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi, APBD dan perhitungan APBD merupakan dokumen daerah yang berfungsi sebagai instrument untuk mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. (Kunarjo, 2002:99)

a) Pajak Daerah

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Adisasmita, 2011:77).Tolak ukur menilai pajak daerah dikemukakan sebagai berikut (Adisasmita, 2011:78):

1. Hasil (*yield*), memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayai, elastis hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan (*equity*), dasar pajak dan kewajiban membayar pajak harus jelas dan tidak sewenang-wenang, harus adil secara horizontal (artinya beban pajak haruslah sama besar untuk kedudukan ekonomi yang sama), harus adil secara vertikal (artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi dan harus adil untuk semua tempat yang berbeda.
3. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*), pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.
4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemampuan politik dan kemampuan tata usaha.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as local revenue source*), haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, tatap memungut pajak sedapat mungkin tidak terlalu jauh dari domisili wajib pajak.

Macam pajak daerah kabupaten cukup banyak dan bervariasi. Dengan peraturan perpajakan yang baru jumlah penerimaan pajak ini diharapkan meningkat untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian dan pembangunan daerahnya masing-masing. Adapun jenis-jenis pajak kabupaten terdiri dari (Suparmoko, 2002:66-69) ; (1). Pajak hotel dan restoran; (2). Pajak hiburan; (3). Pajak reklame; (4). Pajak penerangan jalan; (5). Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

b) Retribusi daerah

Menurut Ahmad Yani (2002:55) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan. Banyak jenis retribusi, tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan obyeknya. Obyek retribusi terdiri dari tiga macam yaitu sebagai berikut (Yani,2002:56-63) :

1. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang termasuk kedalam retribusi jasa pelayanan umum antara lain adalah sebagai berikut : (a). Pelayanan kesehatan; (b). Pelayanan kebersihan dan persampahan; (c). Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil; (d). Pelayanan pemakaman dan pengubuan mayat; (e). Pelayanan parkir di tepi jalan umum; (f). Pelayanan pasar; (g).

Pelayanan air bersih; (h). Pengujian kendaraan bermotor; (i). Pemeriksaan alat pemadam kebakaran; (j).Penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah; (k). Pengujian kapal perikanan.

2. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh faktor swasta. Adapun yang termasuk kedalam retribusi yang dikenakan pada jasa usaha antara lain adalah sebagai berikut : (a).Pemakaian kekayaan daerah; (b).Pasar grosir dan atau pertokoan; (c).Pelayanan terminal; (d).Pelayanan tempat khusus parkir; (e).Pelayanan tempat penitipan anak; (f).Peningapan/pasanggrahan/vila; (g). Penyedotan kakus; (h).Rumah potong hewan; (i).Tempat pendaratan kapal; (j).Tempat rekreasi dan olahraga; (k).Penyebrangan di atas air; (l).Pengolahan air limbah.

3. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. Adapun yang termasuk kedalam retribusi yang dikenakan pada jasa usaha antara lain adalah sebagai berikut : (a).Izin peruntukkan penggunaan tanah; (b).Izin mendirikan

bangunan (IMB); (c). Izin tempat penjualan minuman beralkohol; (d). Izin gangguan; (e).Izin trayek; (f).Izin pengambilan hasil hutan.

c) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya dana perimbangan ini terdiri dari bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan daeri sumber daya alam (Adisasmita,2011:158):

1. *Dana Alokasi Umum (DAU)*Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Bratakusmanto dan Solihin, 2002:1983)
2. *Dana Alokasi Khusus (DAK)*Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN, yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang.

2.1.3 Upaya Peningkatan Sumber-Sumber Pembiayaan Daerah

Dari sisi penerimaan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu ditingkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta sejumlah biaya administrasi tertentu.

Keberhasilan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditentukan oleh beberapa hal. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah (potensi penerimaan daerah) adalah sebagai berikut :

- i. Kondisi awal daerah;

- ii. Peningkatan cakupan (*coverage ratio*) atau ekstentifikasi dan intensifikasi penerimaan;
- iii. Perkembangan PDRB per kapita riil;
- iv. Pertumbuhan penduduk;
- v. Tingkat inflasi;
- vi. Pembangunan baru;
- vii. Sumber pendapatan baru;

2.1.4 Pengertian Peningkatan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Untuk melihat kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Beberapa variabel yang menunjukkan hal tersebut antara lain: kebutuhan fiskal (*fiscal need*); kapasitas fiskal (*fiscal capacity*); upaya fiskal (*fiscal effort*); derajat desentralisasi fiskal; serta koefisien elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (*Musgrave & Musgrave, 1980*). Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen pendapatan asli daerah, menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan keuangan daerah (dari sisi keuangan) dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Kemandirian Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan	Keterangan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif	Peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
Rendah	25% - 50%	Konsultatif	Campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap lebih sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi
Sedang	50% - 75%	Partisipatif	Peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah
Tinggi	75% - 100%	Delegatif	Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah

Sumber : Halim Manajemen Keuangan Daerah Tahun 2004

2.1.5 Kriteria Peningkatan Kemandirian

Terdapat beberapa kriteria untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan diantaranya adalah kemampuan keuangan daerah dan derajat kemandirian daerah. Berdasarkan Sukanto Reksohadiprojo (2000) dalam bukunya “Ekonomi Publik” ada beberapa analisis kinerja keuangan daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai kriteria peningkatan kemandirian daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Operasionalisasi Penelitian Dan Metoda Analisis

Analisis Kemampuan Keuangan	Definisi	Rumus	Tolak Ukur	Manfaat
Desentralisasi fiskal	Derajat untuk mengukur persentase penerimaan daerah antara lain PAD, BHPBP, serta subbagian pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah	$\frac{PAD \times 100}{TPD}$ $\frac{BHPBP \times 100}{TPD}$ $\frac{SBB \times 100}{TPD}$	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan asli daerah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Sumbangan Pemerintah pusat Total penerimaan daerah 	Sebaiknya tinggi hasilnya, maka desentralisasi fiskal semakin tinggi pada Arroyo Apolita jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari bantuan dari pusat maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Semakin tinggi hasilnya, maka desentralisasi fiskal semakin tinggi pula.
Kebudayaan fiskal	untuk mengukur kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Semakin tinggi indeks, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar	$SKF = \frac{\text{Jumlah pengeluaran daerah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times \frac{\text{Jumlah Kecamatan}}{DPP + JPP}$ SKF	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pengeluaran daerah Jumlah penduduk Jumlah kabupaten/kecamatan 	Sebaiknya tinggi hasilnya, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar.
Kapasitas fiskal	apabila kapasitas fiskal (PAD + dana bagi hasil) lebih besar dari pengeluaran (kebutuhan fiskal)	$FC = \frac{\text{PDRB perkapita}}{\text{Kapasitas Fiskal Standar}}$	<ul style="list-style-type: none"> PDRB Per Kapita Jumlah Kabupaten Jumlah Kecamatan 	Apabila kapasitas fiskal (PAD + dana bagi hasil) lebih besar dari pengeluaran (kebutuhan fiskal) maka potensi

Analisis Kemampuan Keuangan	Definisi	Rumus	Tolak Ukur	Manfaat
	maka potensi untuk mendapatkan PAD daerah tersebut cukup tinggi atau tidak bantuan dari pemerintah pusat	$Kf = \frac{\text{PDRB perkapita}}{\text{Jumlah kecamatan}}$		maka mendapatkan PAD daerah tersebut cukup tinggi atau tidak bantuan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi hasilnya, maka kapasitas fiskal suatu daerah semakin tinggi.
Upaya fiskal	Indikator rasio yang digunakan adalah dengan membandingkan koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB. Rasio ini bertujuan untuk melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah, dengan menggunakan 1 variabel.	$e = \frac{\Delta \text{PAD}}{\Delta \text{PDRB}}$	<ul style="list-style-type: none"> PAD PDRB Atas Dasar Harga Konstan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 	Sebaiknya elastis PAD, maka struktur PAD di daerah semakin baik.
Derajat kemandirian daerah	Kemandirian pendapatan daerah seperti PAD, BHPBP dalam membayai pengeluaran daerah seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 100% 2. Total Pengeluaran Daerah (TKD) 3. Kemampuan Asli Daerah (KAD) = 100% 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 100% 	<ul style="list-style-type: none"> PAD Total Pengeluaran Daerah Pengeluaran Rutin Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Total Penerimaan Daerah 	Untuk mengukur tingkat kemandirian daerah adalah derajat kemandirian daerah, yaitu parameter untuk mengukur seberapa jauh pemerintahan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah.

Sumber: Babw. Manajemen Keuangan Daerah: Edisi 2009

2.2 Tinjauan Kebijakan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Berdasarkan Bab IV Sumber Penerimaan Daerah Pasal 5 disebutkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Dimana untuk Pendapatan Daerah bersumber dari:

Pendapatan Asli Daerah;

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.
 - Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - Jasa giro;
 - Pendapatan bunga;
 - Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus (Bab IV Pasal 5). Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. (Pasal 3) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Pasal 1).

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam (Pasal 11). Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak yang terdiri atas :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- c. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1). Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. (Pasal 27). Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkanimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. (Pasal 29) Dana Alokasi

Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Pasal 1). Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN (Pasal 38). Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping(Pasal 41).

BAB III. METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam studi ini berupa metode pendekatan studi, metode pengumpulan data dan metode analisis. Adapun metode yang digunakan dalam studi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu memberikan gambaran umum mengenai tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan sebagai wujud dari desentralisasi pembangunan di Kabupaten Ciamis.

3.1 Pendekatan Studi

Untuk mencapai maksud dan tujuan studi diatas maka perlu diadakannya pendekatan studi adalah sebagai berikut :

- Melakukan studi literatur mengenai tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis.
- Mengidentifikasi objek-objek yang dapat digali untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Ciamis.
- Menganalisis tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan dengan cara mengukur kemampuan keuangan daerah dan derajat kemandirian daerah di Kabupaten Ciamis serta mengukur kemampuan keuangan daerah setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Ciamis, serta mengelompokkannya kedalam kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan.

3.2 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi 2 metode yaitu :

1. **Survei Primer.** Survei primer merupakan survei yang dilakukan berdasarkan observasi atau pengamatan lapangan untuk dapat memberikan gambaran umum secara jelas dan rinci mengenai tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis. Survei primer yang dilakukan berupa wawancara dengan instansi terkait.
2. **Survei Sekunder.** Survei sekunder merupakan survei yang dilakukan dengan caramengumpulkan data dari literatur-literatur terkait serta instansi terkait, seperti Bappeda Kabupaten Ciamis, Dinas Pendapatan, Aset Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ciamis, Sekretariat Daerah bidang pembangunan dan dinas dinas lainnya yang terkait dengan materi studi.

3.3 Metode analisis

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis menggunakan Analisis Keuangan dan Justifikasinya menggunakan **Metoda AHP-SWOT** untuk menghasilkan arahan yang diinginkan.

A. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisa yang berdasarkan data dan dinyatakan dalam bentuk uraian yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau menguatkan suatu gambaran yang telah ada. Dalam analisis kualitatif ini, menguraikan beberapa jenis objek yang dapat digali serta potensi-potensi kegiatan berdasarkan RTRW Kab. Ciamis dan peluang peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis berdasarkan struktur ruang dengan cara membedakan antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, sehingga jenis peluang peningkatan kemandirian dapat dibedakan antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

B. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka). Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa di ukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah.

Tabel 3.1 Metode Analisis Kuantitatif

Analisis Kemampuan Keuangan	Definisi	Rumus	Tolak Ukur	Manfaat
Desentralisasi fiskal	Derajat untuk mengukur persentase penerimaan daerah antara lain PAD, BHPBP, serta sumbangan pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah	$\frac{PAD \times 100}{TPD}$ $\frac{BHPBP \times 100}{TPD}$ $\frac{Sum \times 100}{TPD}$	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah • Bagi hasil pajak dan lain-lain pajak • Sumbangan Pemerintah pusat • Total penerimaan daerah 	Semakin tinggi hasilnya, maka desentralisasi fiskal semakin tinggi pula Artinya Apabila jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari bantuan dari pusat maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Semakin tinggi hasilnya, maka desentralisasi fiskal semakin tinggi pula.
Kebutuhan fiskal	untuk mengukur kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Semakin tinggi indeks, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar	$SKF = \frac{\text{Jumlah pengeluaran daerah}}{\text{Jumlah perolehan}} = \frac{\text{Jumlah Kecamatan IPP} - \text{PPP}}{SKF}$	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengeluaran daerah • Jumlah penduduk kabupaten/kecamatan 	Semakin tinggi hasilnya, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar.
Kapasitas fiskal	apabila kapasitas fiskal (PAD + dana Bagi hasil) lebih besar dari pengeluaran (kebutuhan fiskal)	$FC = \frac{PAD + \text{dana Bagi hasil}}{\text{Pengeluaran}} = \frac{PAD + \text{dana Bagi hasil}}{\text{Kapasitas Fiskal Standar}}$	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB Per Kapita • Jumlah Kabupaten/ Kecamatan 	Apabila kapasitas fiskal (PAD + dana bagi hasil) lebih besar dari pengeluaran (kebutuhan fiskal) maka potensi

Analisis Kemampuan Keuangan	Definisi	Rumus	Tahap Ukur	Manfaat
	maka potensi untuk mendapatkan PAD di daerah tersebut cukup bagus tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat	$KF = \frac{PAD}{Jumlah\ kecamatan}$		untuk mendapatkan PAD di daerah tersebut cukup bagus tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi hasilnya, maka kapasitas fiskal suatu daerah semakin tinggi.
Upaya fiskal	Indikator rasio yang digunakan adalah dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB. Rasio ini bertujuan untuk melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah, dengan menghitung 1 variabel.	$\epsilon = \frac{\% \Delta PAD}{\% \Delta PDRB}$	<ul style="list-style-type: none"> PAD PDRB Atas Dasar Harga Konstan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 	Semakin elastis PAD, maka struktur PAD di daerah semakin baik.
Derajat kemandirian daerah	Kemampuan pendapatan daerah seperti PAD, BHPBP dalam asennya pengeluaran daerah seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Atas Dasar PAD: $\times 100\%$ Total Pengeluaran Daerah (TKD) Indeks Atas Dasar PAD: $\times 100\%$ Total Pengeluaran Daerah (TKD) 	<ul style="list-style-type: none"> PAD Total Pengeluaran Daerah Pengeluaran Rutin Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Total Pengeluaran Daerah 	Untuk mengukur tingkat kemandirian daerah adalah derajat kemandirian daerah, yaitu parameter untuk mengukur seberapa jauh pemenuhan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah.

Sumber: Hasil, Manajemen Keuangan Daerah Tahun 2004

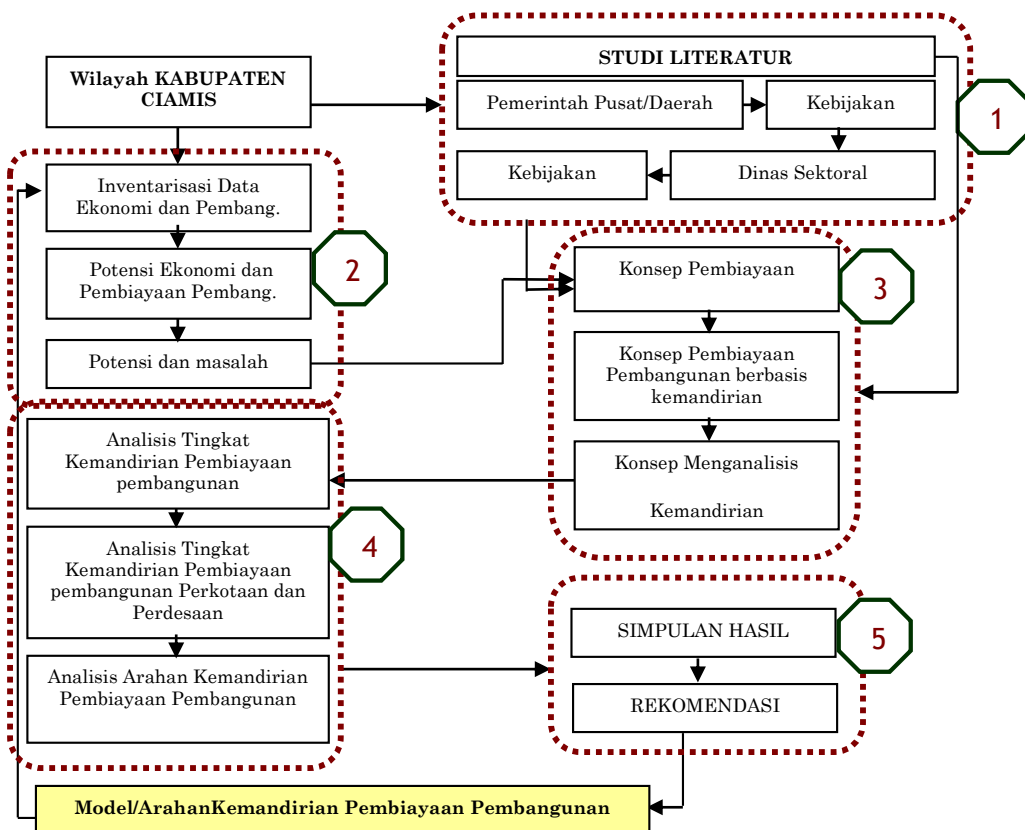
3.4 Alur Penelitian/Research Frame Work

Alur penelitian ini terbagi ke dalam 5 tahap, adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

- Tahap pertama tahapan penelitian adalah mengkaji kondisi Kebijakan Pusat, provinsi dan kabupaten dalam melakukan pengelolaan pembiayaan pembangunan. Pada tahap ini dilakukan analisis berupa kajian kelembagaan terdiri dari dua hal pokok yaitu : pertama adalah produk kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah berkenaan dengan pembiayaan dan yang kedua adalah melihat peran dan fungsi dinas-dinas kabupaten yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan dalam melaksanakan program-programnya. Di samping itu juga dilaksanakan kajian literatur terkait dengan pengelolaan pembiayaan pembangunan.
- Tahap kedua penelitian ini adalah 1) melakukan inventarisasi data-data yang terkait dengan potensi ekonomi pembangunan, 2) dengan melihat karakteristik potensi ekonomi pembangunan kabupaten 3) mengetahui permasalahan dan potensi yang ada terkait dengan pembiayaan pembangunan.
- Tahap ketiga penelitian ini adalah melakukan kompilasi mengenai konsepsi dalam pembiayaan pembangunan dan tingkat kemandirian dalam membiayai pembangunan, kebijakan dan karakteristik pembiayaan pembangunan kabupaten dengan hasil kajian studi literatur mengenai teori konsep wilayah pesisir, Konsep yang didapat pada tahap ini menjadi landasan menentukan variabel dalam menilai kemandirian pembiayaan pembangunan secara keseluruhan.

- Tahap keempat dalam penelitian ini adalah menganalisis tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan, menganalisis tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan serta menganalisis arahan bagi peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan.
- Tahap kelima dalam penelitian ini adalah tahap finalisasi penelitian untuk menghasilkan simpulan dan rekomendasi untuk selanjutnya menyusun model peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis.

Gambar 3.1 Research Frame Work/Alur Penelitian



BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Ciamis

A. Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik

Ciamis sebagai salah satu provinsi di Jawa Barat, secara geografis berada pada posisi strategis serta dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis – Cirebon – Jawa Tengah. Secara astronomis Kabupaten Ciamis berada pada $108^{\circ}20'$ sampai dengan $108^{\circ}40'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}40'20''$ sampai dengan $7^{\circ}41'20''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Ciamis sebesar 244,479 Ha atau 7,73 persen dari total luas daratan Propinsi Jawa Barat (Termasuk DOB Pangandaran). Dalam konteks pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis mempunyai 2 (dua) Kawasan Andalan yaitu Kawasan Andalan Priangan Timur dan Kawasan Andalan Pangandaran. Tetapi setelah DOB pangandaran disahkan, kawasan andalan Pangandaran tidak lagi bergabung dengan kabupaten Ciamis. Secara administratif Kabupaten Ciamis berbatasan dengan wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan,
- Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya,
- Sebelah Timur : Kota Banjar dan Propinsi Jawa Tengah,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pangandaran.

Kabupaten Ciamis mempunyai iklim tropis, suhu rata-rata berkisar antara 26°C - 27°C dengan suhu minimum 24°C dan suhu maksimum 30°C . Kelembaban udara bervariasi antara 85% hingga 89%. Curah hujan berkisar antara 1500-4000 mm/tahun. Hampir sepanjang tahun mengalami hujan kecuali bulan Juni, Juli dan Agustus. Kabupaten Ciamis terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar-bergelombang sampai pegunungan, dengan kemiringan lereng berkisar antara 0 – 40 % dengan sebaran 0 – 2 % terdapat di bagian tengah - timur laut ke selatan dan 2-40 % tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Jenis tanah didominasi oleh Latosol, podsolik, alluvial dan grumusol.

Dari segi topografi bentuk wilayah Kabupaten Ciamis dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Wilayah Ciamis bagian utara merupakan dataran tinggi berbukit, yaitu wilayah Gunung Sawal dengan kemiringan lahan antara 15%-40%. Namun demikian kemiringan pada beberapa daerah mencapai lebih dari 40%.
- Wilayah Ciamis bagian tengah dan selatan merupakan dataran rendah, sebagian kecil bergelombang dengan kemiringan lahan 15-40 % dan sebagian pesisir relatif landai dengan kemiringan antara 0%-15%.

Ketinggian lahan di Kabupaten Ciamis bervariasi antara 0-2000 m di atas permukaan laut.

Tabel 4.1.
Kemiringan Lahan dan Satuan Morfologi

No.	Bentuk Bentang Alam	Kemiringan Lahan (%)	Satuan Morfologi
1.	Datar	0 – 2	Dataran rendah
2.	Landai	2 – 15	Daerah dataran (plain)
3.	Sedang	15 – 40	Dataran perbukitan karst
4.	Agak Kasar	> 40	Pegunungan

Sumber : Pola PSDA WS.Citanduy 2013

Luas wilayah Ciamis pada tahun 2011 sebesar 244,479 Ha atau 7,73 persen dari total luas daratan Propinsi Jawa Barat dengan jumlah 36 Kecamatan, namun setelah terbentuknya DOB Kabupaten Pangandaran luas wilayah Ciamis menjadi 143.200 Ha dengan jumlah 26 Kecamatan. Dengan luas wilayah tersebut Kecamatan Banjarsari memiliki luas wilayah yang paling besar yaitu sebesar 16.300 Ha atau 11,38%. Berikut Tabel 2.2 menyajikan nama, luas wilayah perkecamatan dan jumlah kelurahan.

Tabel 4.2
Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan Dan Jumlah Kelurahan

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Desa	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%) thd total
Cimerak*	11	11818	4,84%
Cijulang*	7	9316	3,81%
Cigugur*	7	9729	3,98%
Langkaplancar*	14	17719	7,25%
Parigi*	10	9804	4,01%
Sidamulih*	7	7798	3,19%
Pangandaran*	8	6077	2,49%
Kalipucang*	9	13678	5,60%
Padaherang*	14	8927	3,65%

Banjarsari	21	16300	6,67%
Lakbok	10	5800	2,37%
Pamarican	14	10400	4,26%
Cidolog	6	5900	2,41%
Cimaragas	5	2700	1,10%
Cijeunjing	11	5800	2,37%
Cisaga	11	6000	2,46%
Tambaksari	6	6400	2,62%
Rancah	13	7300	2,99%
Rajadesa	11	5800	2,37%
Sukadana	6	5800	2,37%
Ciamis	12	3300	1,35%
Cikoneng	9	3600	1,47%
Cihaurbeuti	11	3600	1,47%
Sadananya	8	4400	1,80%
Cipaku	13	6600	2,70%
Jatinagara	6	3500	1,43%
Panawangan	15	8100	3,31%
Kawali	11	3300	1,35%
Panjalu	8	6700	2,74%
Panumbangan	14	5900	2,41%
Sindangkasih	9	2700	1,10%
Baregbeg	9	2400	0,98%
Lumbang	8	2500	1,02%
Purwadadi	9	4000	1,64%
Mangunjaya*	5	6303	2,58%
Sukamantri	5	4400	1,80%
	353	244369	100%

Sumber : Ciamis Dalam Angka 2013

B. Demografi

Luas wilayah Kabupaten Ciamis adalah 244,300 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 1.774.032 orang termasuk DOB Pangandaran, menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dari 657 orang per km² pada Tahun 2010 menjadi 726 orang per km² pada Tahun 2011. Dari segi penyebarannya, 5,7 persen penduduk Kabupaten Ciamis bertempat tinggal di Kecamatan Ciamis sehingga menyebabkan kepadatan tertinggi (3.065 orang per kilometer persegi). Hal ini dapat dimengerti karena Kecamatan Ciamis merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan Perekonomian. Kepadatan cukup tinggi juga dialami oleh Kecamatan Cikoneng, Cihaurbeuti, Kawali, Sindangkasih, Baregbeg dan Lumbang.

Kepadatan penduduk juga tampak dari rata-rata anggota keluarga yang mencapai 3,15 sehingga secara umum setiap keluarga memiliki 3 sampai dengan 4 orang anggota keluarga. Tabel lain menggambarkan perbandingan usia penduduk tidak produktif (usia 0-14 & 65+ tahun) dibanding usia produktif (usia 15-64 tahun) yang menunjukkan angka beban tanggungan. Angka beban tanggungan pada Tahun 2011 sebesar 46 persen ternyata lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 47.35 persen.

Komposisi penduduk menurut usia, nampaknya perlu dicermati karena penduduk kelompok usia 5-9 tahun, 10-14 tahun dan usia 15-49 tahun cukup banyak. Hal ini berkaitan dengan masalah pendidikan dasar dan fertilitas atau kesehatan reproduksi.

Tabel dibawah ini menunjukkan pada tahun 2009 di kecamatan Cimerak terjadi pertumbuhan yang sangat besar yaitu 76,51% disusul dengan kecamatan Padaherang sebesar 17,39%, sedangkan untuk daerah yang tingkat pertumbuhannya lamban yaitu kecamatan Sukamantri -23,23% terjadi pada tahun 2011, untuk dapat jelasnya berikut disajikan dalam bentuk Tabel 2.6 Jumlah penduduk dan kepadatannya 4 tahun terakhir.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Dan Kepadatannya 4 Tahun Terakhir

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk				Jumlah KK				Tingkat Pertumbuhan				Kepadatan Penduduk			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Cimerak	44.997	46.349	47.695	24.995	14.383	14.999	15.436	16.353	3,00%	2,90%	-47,59%	76,51%	381	393	404	424
Cijulang	26.540	25.729	27.621	28.666	9.391	8.954	9.980	10.527	-3,06%	7,35%	3,78%	-7,91%	285	277	296	308
Cigugur	21.319	21.457	22.639	23.464	6.748	6.860	7.169	7.472	0,65%	5,51%	3,64%	-10,07%	220	221	233	242
Langkaplancar	48.443	48.833	50.235	52.515	14.932	15.148	15.592	16.345	0,81%	2,87%	4,54%	-9,85%	274	276	284	297
Parigi	42.873	42.261	45.070	46.932	14.597	14.241	15.646	16.228	-1,43%	6,65%	4,13%	-9,77%	237	431	460	479
Sidamulih	27.348	28.237	29.117	29.930	9.202	9.640	9.967	10.352	3,25%	3,12%	2,79%	-9,91%	351	362	373	384
Pangandaran	51.582	51.820	55.937	57.467	15.177	14.941	16.894	17.645	0,46%	7,94%	2,74%	-7,26%	846	850	920	942
Kalipucang	37.474	37.333	40.746	41.156	11.346	10.807	12.545	13.037	-0,38%	9,14%	1,01%	-12,36%	274	273	298	300
Padaherang	67.184	62.483	73.348	75.501	20.773	19.374	22.870	24.041	-7,00%	17,39%	2,94%	-18,36%	565	525	822	634
Banjarsari	107.838	110.656	115.746	119.438	32.550	33.407	35.400	37.220	2,61%	4,60%	3,19%	-13,13%	662	679	710	733
Lakbok	54.912	54.627	59.608	60.961	15.948	16.102	17.416	18.044	-0,52%	9,12%	2,27%	-20,09%	947	942	1.073	1.051
Pamarican	68.445	68.212	73.014	74.882	21.154	21.132	22.882	23.718	-0,34%	7,04%	2,56%	-14,11%	658	656	701	720
Cidolog	20.031	19.636	20.602	21.059	6.594	6.384	6.799	7.074	-1,97%	4,92%	2,22%	-10,94%	340	333	349	357
Cimaragas	16.177	15.446	17.008	17.104	5.414	5.383	5.713	5.914	-4,52%	10,11%	0,56%	-9,46%	599	572	628	633
Cijeunjing	49.859	48.565	53.181	54.330	15.761	14.613	17.100	17.790	-2,60%	9,50%	2,16%	-5,72%	860	837	913	937
Cisaga	38.014	37.359	39.729	40.219	12.926	12.737	13.694	14.086	-1,72%	6,34%	1,23%	-8,74%	634	623	658	670
Tambaksari	22.966	22.817	23.488	24.040	2.869	8.132	8.544	8.788	-0,65%	2,94%	2,35%	-10,80%	359	357	365	376
Rancah	58.570	56.189	60.558	61.808	19.082	18.553	19.861	20.715	-4,07%	7,78%	2,06%	-9,46%	802	770	829	847
Rajadesa	51.847	52.828	56.059	58.265	16.124	16.964	17.382	18.411	1,89%	6,12%	3,94%	-16,72%	894	911	964	1.005
Sukadana	23.967	24.487	24.994	25.833	8.582	8.114	8.953	9.277	2,17%	2,07%	3,36%	-11,92%	413	422	429	445
Ciamis	93.217	91.943	99.543	101.133	27.446	26.950	30.223	31.763	-1,37%	8,27%	1,60%	-5,26%	2.825	2.786	3.373	3.065
Cikoneng	52.338	49.169	55.543	57.035	14.672	15.133	15.841	16.574	-6,05%	12,96%	2,69%	-11,39%	1.454	1.366	1.628	1.584
Cihaurbeuti	50.963	51.801	54.023	55.602	14.941	15.306	15.962	16.700	1,64%	4,29%	2,92%	-16,02%	1.416	1.439	1.494	1.545
Sadananya	35.040	35.109	37.487	38.993	10.535	3.670	11.466	12.091	0,20%	6,77%	4,02%	-12,69%	796	798	862	886
Cipaku	63.787	62.804	68.257	70.945	19.704	19.937	21.286	22.372	-1,54%	8,68%	3,94%	-17,53%	966	952	1.039	1.075
Jatinagara	26.222	26.151	27.437	29.164	8.165	8.388	8.578	9.019	-0,27%	4,92%	6,29%	-9,28%	749	747	775	833
Panawangan	51.664	50.200	55.716	56.859	15.893	16.608	17.302	18.065	-2,83%	10,99%	2,05%	-15,95%	638	620	689	702
Kawali	40.892	40.344	42.802	44.131	12.766	12.722	13.454	14.091	-1,34%	6,09%	3,10%	-10,20%	1.239	1.223	1.223	1.337
Panjalu	46.818	46.550	50.399	52.430	13.143	13.212	14.250	15.172	-0,57%	8,27%	4,03%	-16,45%	699	695	620	783
Panumbangan	60.523	61.776	64.104	66.598	17.610	16.749	18.995	19.608	2,07%	3,77%	3,89%	-15,59%	1.026	1.047	1.078	1.129
Sindangkasih	47.302	47.985	50.615	54.312	13.452	16.658	14.570	15.892	1,44%	5,48%	7,30%	-15,85%	1.752	1.777	1.663	2.012
Baregbeg	41.903	40.426	43.820	44.356	13.215	13.406	13.925	14.272	-3,52%	8,40%	1,22%	-6,12%	1.446	1.684	2.179	1.849
Lumbung	30.824	30.038	32.664	33.670	9.931	9.435	10.508	11.028	-2,55%	8,74%	3,08%	-15,50%	1.233	1.202	1.410	1.347
Purwadadi	39.289	39.834	41.863	42.954	11.681	11.468	17.791	13.289	1,39%	5,09%	2,61%	-18,09%	982	996	965	1.074
Mangunjaya	31.491	31.986	33.763	34.958	9.868	9.960	10.619	11.200	1,57%	5,56%	3,54%	-17,33%	954	969	536	1.059
Sukamantri	24.119	23.974	25.849	27.327	6.968	6.977	7.529	8.163	-0,60%	7,82%	5,72%	-23,23%	548	545	765	621

Sumber : BPS Kab. Ciamis, 2008-2012

C. Tata Ruang Wilayah

(1). Kebijakan Penataan Ruang Wilayah dalam RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031

Pertambahan penduduk di Kabupaten Ciamis saat ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional (sekitar 0,46 persen). Meski demikian kabupaten Ciamis menggalakkan sektor agrobisnis dan pariwisata sebagai ujung tombak meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya, dengan memperhatikan kelestarian alam dan mitigasi kebencanaan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
- b. penataan lahan pertanian lahan basah;
- c. pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya;
- d. penataan lahan dan kawasan hutan;
- e. penataan kawasan perkebunan;
- f. pengembangan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan sesuai potensi lestari;
- g. pengembangan sektor industri, peternakan, dan perdagangan mendukung agrobisnis;
- h. pengembangan pusat kegiatan agrobisnis, pariwisata dan permukiman;
- i. pengembangan sistem jaringan prasarana kegiatan agrobisnis, pariwisata, dan permukiman;
- j. pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarianlingkungan dan kebencanaan;
- k. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- l. Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana.

(2). Strategi Penataan Ruang dalam RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud maka ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis.

- 1) Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dengan strategi meliputi:
 - a. mempertahankan kawasan lindung yang sudah ditetapkan;

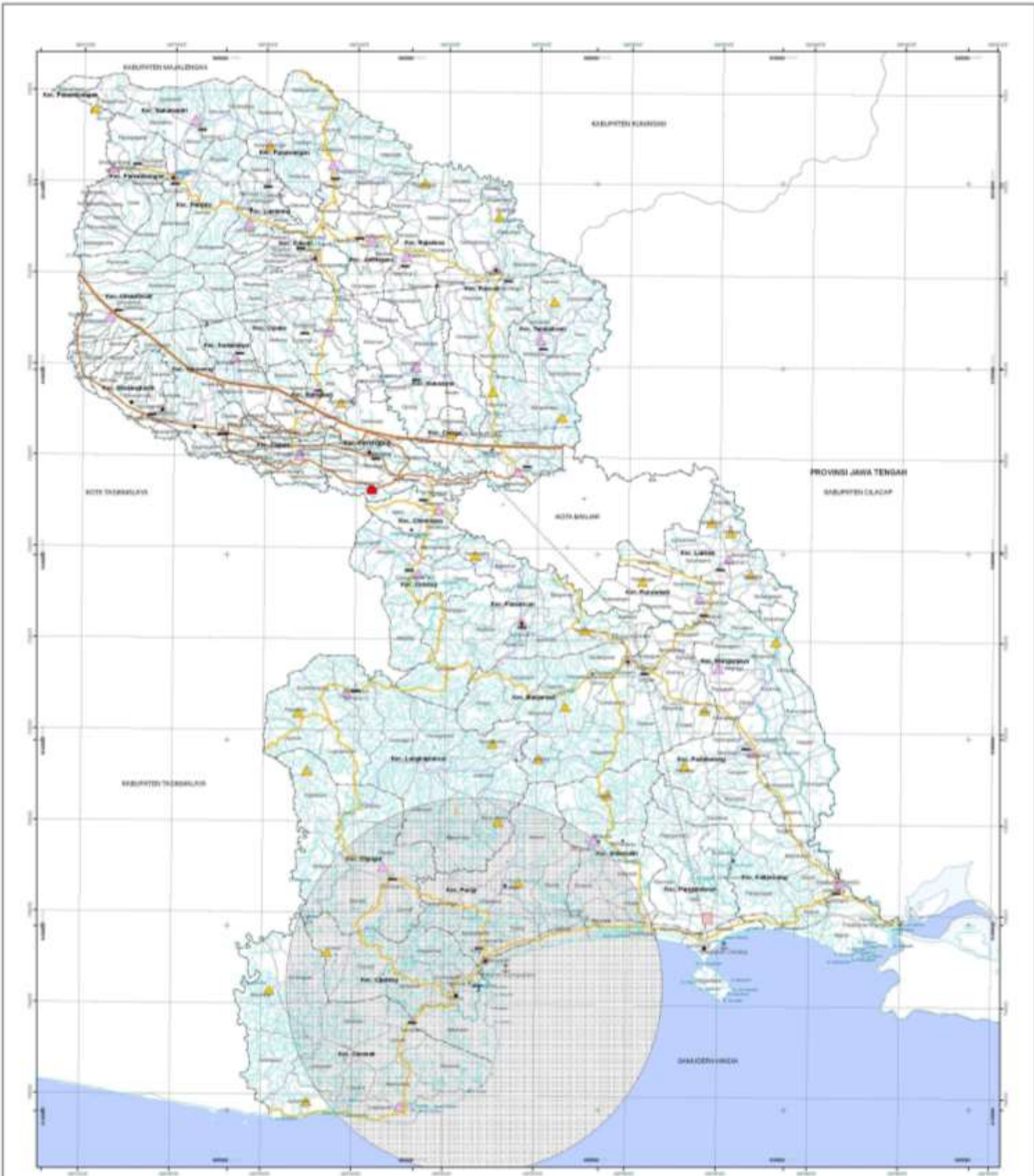
- b. memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. mengembangkan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung; dan
 - d. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi.
- 2) Penataan lahan pertanian lahan basah dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan agropolitan;
 - b. menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan;
 - c. menetapkan kawasan strategis lumbung padi; dan
 - d. meningkatkan produktivitas lahan.
- 3) Pengembangan wisata potensial yang ramah lingkungan dan ramah budaya dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan ekowisata, agrowisata, wisata budaya, dan jasa lingkungan;
 - b. mengoptimalkan wisata unggulan wilayah Utara Kabupaten;
 - c. mengoptimalkan wisata unggulan wilayah Selatan Kabupaten; dan
 - d. mengembangkan sistem informasi, promosi, akomodasi, dan infrastruktur.
- 4) Penataan lahan dan kawasan hutan dengan strategi meliputi:
- a. merehabilitasi hutan dan lahan kritis;
 - b. mengoptimalkan industri hasil hutan;
 - c. mengembangkan hasil hutan bukan kayu;
 - d. mengembangkan keanekaragaman jenis tanaman hutan; dan
 - e. menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.
- 5) Penataan kawasan perkebunan dengan strategi meliputi:
- a. mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil perkebunan; dan
 - b. mengembangkan fungsi kawasan perkebunan secara terpadu dengan peternakan dan pertanian lahan kering.
- 6) Pengembangan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan sesuai potensi lestari dengan strategi meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budi daya laut, air payau, dan tawar;
 - b. memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kelautan;
 - c. mengembangkan industri pengolahan ikan; dan
 - d. mengembangkan kawasan Minapolitan.

- 7) Pengembangan sektor industri, peternakan, dan perdagangan yang mendukung agrobisnis dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan industri kecil, menengah, dan industri besar;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
 - c. mengembangkan daerah potensial peternakan;
 - d. merevitalisasi dan mengembangkan prasarana perdagangan dan pasar modern;
 - e. memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan perdagangan tradisional; dan
 - f. menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan modern.
- 8) Pengembangan pusat kegiatan agrobisnis, pariwisata dan permukiman dengan strategi meliputi:
 - a. menetapkan sistem hirarki kota-kota;
 - b. mendorong pemerataan pertumbuhan permukiman di PKW,PKL dan PPK;
 - c. mendorong pertumbuhan PPL;
 - d. mendorong terwujudnya sistem perkotaan dengan mengalokasikan fasilitas pelayanan yang sesuai; dan
 - e. mendorong berkembangnya pusat pelayanan berdaya saing eksternal.
- 9) Pengembangan sistem jaringan prasarana kegiatan agrobisnis, pariwisata, dan permukiman dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi;
 - b. mengembangkan infrastruktur penghubung simpul kegiatan ekonomi produksi;
 - c. meningkatkan status dan kualitas jalan;
 - d. meningkatkan tipe terminal selaras hirarki kota;
 - e. mengaktifkan transportasi kereta api secara terpadu;
 - f. mengembangkan infrastruktur bandara;
 - g. mengaktifkan kembali dermaga penyeberangan sungai;
 - h. mengoptimalkan dermaga penyeberangan;
 - i. menyediakan prasarana energi dan telekomunikasi;
 - j. menyediakan jaringan prasarana sumber daya air;
 - k. mengembangkan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya;
 - l. menyediakan sarana prasarana persampahan dan meningkatkan sistem pengelolaan;
 - m. mengembangkan dan menyediakan air bersih sesuai potensi air baku;
 - n. menyediakan air bersih pada kawasan rawan air bersih;

- o. menyediakan sarana dan prasarana jalur evakuasi;
 - p. menyediakan sistem pengolahan air limbah ramah lingkungan;
 - q. memantapkan pengendalian dan normalisasi sungai;
 - r. mengembangkan drainase pada daerah banjir;
 - s. meningkatkan investasi komoditas unggulan;
 - t. menyediakan infrastruktur pada pusat kegiatan dan kawasan perbatasan; dan
 - u. menyediakan infrastruktur skala pelayanan perdesaan di pusat desa.
- 10) Pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan dengan strategi meliputi:
- a. memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral ramah lingkungan;
 - b. memanfaatkan potensi tambang secara ramah lingkungan;
 - c. merehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
 - d. mengembalikan secara bertahap kawasan lindung yang berubah fungsi;
 - e. mengembangkan luas kawasan hutan;
 - f. melakukan gerakan penanaman pohon dan penghijauan lingkungan;
 - g. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan dan sumber daya alam;
 - h. mengendalikan perkembangan koridor jalan arteri primer;
 - i. mengendalikan perkembangan koridor kawasan pesisir dan kota-kota pantai;
 - j. memasyarakatkan sumur resapan air hujan;
 - k. menyediakan *check dam*, embung, dan dam penahan; dan
 - l. melengkapi industri dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau sesuai skala kegiatannya.
- 11) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:
- a. mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.
- 12) Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencanadengan strategi meliputi::
- a. mengendalikan pembangunan fisik pada kawasan rawan bencana;
 - b. memanfaatkan penggunaan teknologi mitigasi bencana;

- c. mengembangkan kawasan budidaya yang dapat mempertahankan kawasan dari dampak bencana gerakan tanah, gempa tektonik, banjir, dan tsunami;
- d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
- e. menetapkan kawasan evakuasi bencana; dan
- f. meningkatkan infrastruktur pada kawasan rawan bencana.

Tujuan ini akan menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam alokasi ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berikut adalah peta rencana pusat layanan dan rencana pola ruang Kabupaten Ciamis.



Lampiran III
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

1:150.000

0 25 50 75 100 125

U
T
S
B

Provinsi: Transkaribia Selandia
Matahari (S) 120° 00' 00" UTM
Datum: WGS 1984
Zona: 50Q 48 S

KETERANGAN

- Kotabatas Kabupaten
- Kotabatas Kecamatan
- Jalan Perintis
- Jalan Kabupaten
- Jalan Kecamatan
- Jalan Desa
- Sungai
- Danau
- Saluran
- 0-100 m
- 100

Transportasi

- ✈ Pelabuhan Laut
- ✈ Pelabuhan Perikanan
- ✈ Terminal A
- ✈ Terminal C
- Rel KA
- ✈ Bandara
- RKOP
- Rencana Jalan, Jalan, Hambatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer

- TPA
- Bantangan

Pasaran Energi

- 6.6 kV
- 15 kV
- 20 kV
- 35 kV

Sistem Perencanaan

- RTR

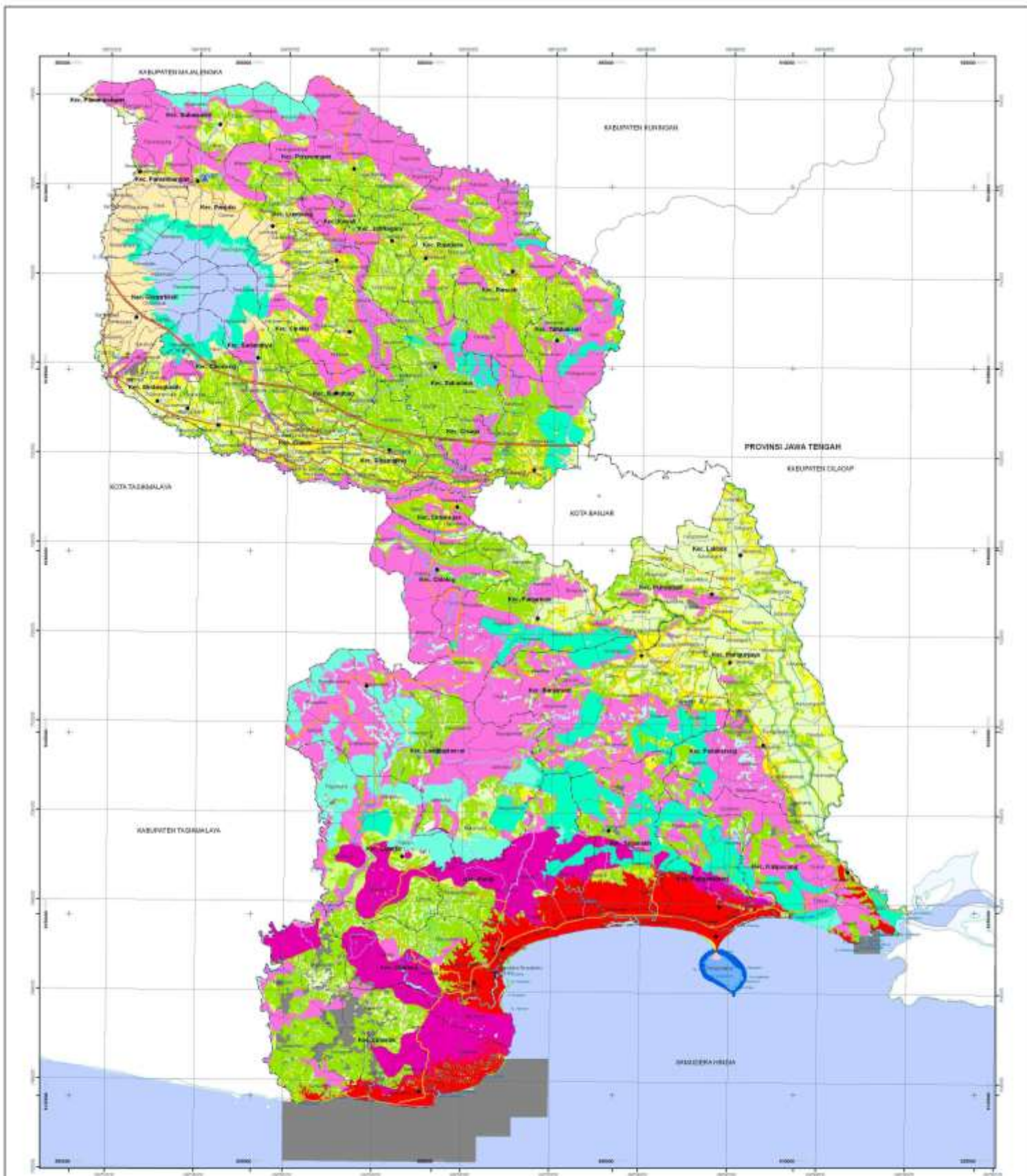
SUMBER:

1. Peta Dasar Ruang Bukti Skala 1:25.000 BAKOSURTIAL, Tahun 2008
2. BPS/PSM, Tahun 2008
3. BPS/PSM, Tahun 2009
4. Hasil Rencana, Tahun 2008

 **PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**

Bupati Ciamis

Disusun oleh: (H. ENKON KOMARA)



Lampiran VI
PETA RENCANA POLA RUANG

1:152,542

U
N
T
S

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15

Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Scale: 49.0

Grid Geografis dan Grid UTM

KETERANGAN

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Desa
- Batas Desa
- Sungai
- Desa

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung	Kawasan Budidaya
Resapan Air	Hutan Produksi Terbatas
Sesak Margasatwa	Hutan Produksi Tetap
Cagar Alam Panjang	Hutan Rakyat
Cagar Alam Panjang	Sawah
Cagar Alam Last Pangandaran	Lahan Kering
Taman Wisata Alam Pangandaran	Hidrokultur
Rawan Gerakan Tanah	Kebun/Perkelamban
Rawan Tsunami	Pemukiman

SUMBER:

1. Data Dasar Rupa Bumi Skala 1:25,000 BAKOSURTNAL, Tahun 2009
2. RTM/RA, Tahun 2008
3. RTM/RV, Tahun 2008
4. Hasil Rencana, Tahun 2009

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

Bupati Ciamis

Dibundahkan di Ciamis
Pada Tanggal: 12-12-2012

(H. ENKON KOMARA)

D. Sosial dan Budaya

(1) Pendidikan

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu faktor utama terhadap keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Peningkatan SDM lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Ciamis berusaha secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk melalui jalur pendidikan. Upaya pemenuhan terhadap peningkatan tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Ciamis, salah satunya dengan cara penyediaan fasilitas pendidikan yang tersebar di beberapa kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten/Kota

Nama Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan						
	Umum				Agama		
	SD	SLTP	SMA	SMK	MI	MTs	MA
<i>Cimerak</i>	36	4	-	-	9	4	1
<i>Cijulang</i>	20	4	-	2	2	3	1
<i>Cigugur</i>	18	4	-	1	6	4	1
<i>Langkaplancar</i>	42	7	1	2	10	5	1
<i>Parigi</i>	35	5	1	2	5	3	1
<i>Sidamulih</i>	19	4	-	-	2	0	1
<i>Pangandaran</i>	29	7	2	3	6	2	1
<i>Kalipucang</i>	31	6	-	2	3	3	1
<i>Padaherang</i>	43	9	-	2	6	3	3
Banjarsari	63	15	3	6	11	4	2
Lakbok	31	3	1	2	13	6	3
Pamarican	36	5	1	2	2	1	0
Cidolog	14	2	-	-	9	8	4
Cimaragas	12	2	1	-	2	3	0
Cijeungjing	27	5	2	5	2	1	0
Cisaga	25	5	1	3	10	7	1
Tambaksari	21	2	-	-	10	4	2
Rancah	50	6	1	2	2	3	0
Rajadesa	35	6	1	1	6	4	1
Sukadana	17	3	1	-	6	7	5
Ciamis	47	11	4	9	5	4	3
Cikoneng	30	7	1	-	10	6	4
Cihaurbeuti	31	5	1	2	4	7	0
Sadananya	20	4	-	1	9	1	1
Cipaku	41	7	1	-	6	6	4
Jatinagara	18	5	-	1	1	2	1
Panawangan	43	4	2	4	4	5	2
Kawali	24	6	1	4	4	3	1
Panjalu	28	4	1	-	5	2	0
Panumbangan	40	8	-	3	2	2	1

Sindangkasih	25	2	1	1	6	4	2
Baregbeg	20	4	1	1	4	4	1
Lumbung	19	4	1	-	5	1	0
Purwadadi	24	5	-	1	5	2	0
Mangunjaya	20	2	1	-	15	7	3
Sukamantri	14	4	-	-	8	3	1

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Ciamis dan Kantor Kemenag Kab. Ciamis, 2013

(2) Kemiskinan

Situasi perekonomian Kabupaten Ciamis dapat terlihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB Kabupaten Ciamis pada Tahun 2010 atas dasar harga berlaku sebesar 17,6 triliun rupiah atau naik 10,93 persen dibanding Tahun 2009 dan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010 (tanpa pengaruh inflasi) sebesar 7,4 triliun rupiah atau naik 5,07 persen dibanding Tahun 2009. Laju pertumbuhan PDRB baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, sektor Listrik, Gas dan air bersih mengalami pertumbuhan tertinggi. Tingkat pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan secara harga berlaku adalah 10,88 %. Namun karena faktor kenaikan bahan baku (inflasi) pada sektor tersebut maka kenaikan realnya hanya 6,56 %. Berdasarkan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2009 atas dasar harga konstan terungkap bahwa kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan masih dominan yaitu sebesar 29,70 persen, kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 26,52 persen dan sektor jasa menyumbang 16,63 persen serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,22 persen. Namun demikian besarnya kontribusi sektor-sektor tersebut pada Tahun 2010 apabila kita bandingkan dengan Tahun 2009 ternyata mengalami pergeseran. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan ternyata mengalami penurunan dibanding Tahun 2009, sedangkan untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mengalami peningkatan.

Salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga adalah tingkat pendapatan total maupaun pendapatan perkapita. Indikator lain adalah distribusi pendapatan pada suatu wilayah yang diukur dengan menggunakan indeks Gini (G). Kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan rumah tangga tersebut di atas rata-rata mencerminkan pekerjaan utama rumah tangga. Struktur pengeluaran juga merupakan indikator kesejahteraan yang sama pentingnya dengan indikator lainnya pada rumah tangga. Tingkat pemerataan pengeluaran rumah tangga dapat dilihat dari hasil distribusi antar komponen pengeluaran yang dapat dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk pangan dan non-pangan. Jumlah

penduduk miskin di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2012 berdasarkan data BPS adalah sebesar 9,62 persen. Untuk melihat distribusi per Kecamatan dapat dideskripsikan melalui data PPLS 2011 dengan 10 % tingkat ekonomi terendah.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah keluarga miskin (KK)
<i>Cimerak</i>	1,356
<i>Cijulang</i>	421
<i>Cigugur</i>	918
<i>Langkaplancar</i>	1,839
<i>Parigi</i>	727
<i>Sidamulih</i>	530
<i>Pangandaran</i>	840
<i>Kalipucang</i>	654
<i>Padaherang</i>	1,334
Banjarsari	3,311
Lakbok	1,397
Pamarican	2,133
Cidolog	835
Cimaragas	455
Cijeungjing	928
Cisaga	940
Tambaksari	507
Rancah	1,144
Rajadesa	1,085
Sukadana	548
Ciamis	1,265
Cikoneng	1,891
Cihaurbeuti	1,515
Sadananya	1,012
Cipaku	1,820
Jatinagara	924
Panawangan	1,107
Kawali	867
Panjalu	1,345
Panumbangan	2,394
Sindangkasih	1,330
Baregbeg	1,286
Lumbung	865
Purwadadi	1,059
<i>Mangunjaya</i>	728
Sukamantri	857

Sumber : Buku Analisis Kemiskinan Kab. Ciamis Tahun 2011

(3) Perumahan

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia. Selain sebagai salah satu kebutuhan dasar, rumah dan kelengkapannya merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat dan menjadi salah satu target millenium Development Goals (MDGs) tahun 2020.

Disamping itu rumah merupakan sarana pendidikan keluarga, persemaian nilai budaya, serta penyiapan generasi bangsa untuk menghadapi tantangan dunia yang lebih berat di masa mendatang. Dengan perspektif tersebut, maka kualitas bangsa di masa depan akan sangat ditentukan oleh kondisi dan kualitas perumahan dan kawasan permukiman saat ini. Tabel 4.6 menyajikan jumlah rumah per kecamatan.

Tabel 4.6
Jumlah Rumah Per Kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah
<i>Cimerak</i>	14,111
<i>Cijulang</i>	9,546
<i>Cigugur</i>	8,571
<i>Langkaplancar</i>	13,883
<i>Parigi</i>	18,383
<i>Sidamulih</i>	9,429
<i>Pangandaran</i>	10,983
<i>Kalipucang</i>	6,136
<i>Padaherang</i>	18,526
Banjarsari	30,844
Lakbok	14,375
Pamarican	21,920
Cidolog	6,403
Cimaragas	5,058
Cijeungjing	14,645
Cisaga	13,201
Tambaksari	8,925
Rancah	23,758
Rajadesa	14,760
Sukadana	7,976
Ciamis	27,487
Cikoneng	12,648
Cihaurbeuti	13,170
Sadananya	9,600
Cipaku	18,651
Jatinagara	8,399
Panawangan	17,015
Kawali	10,158
Panjalu	12,458
Panumbangan	18,196
Sindangkasih	12,869
Baregbeg	14,177
Lumbung	9,436
Purwadadi	11,292
<i>Mangunjaya</i>	9,959
Sukamantri	7,062

E. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, kepala pemerintahan Kabupaten Ciamis untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi tersebut, di pimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati, yang dalam menjalankan tugas pemerintahan tersebut bersama-sama dengan DPRD, Perangkat daerah Kabupaten Ciamis terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan, dan Kelurahan.

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis didalam menjalankan tugasnya membawahi Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Sekretariat Daerah. Sementara itu, Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh; Asisten Pemerintahan, Asisten Pembangunan, dan Asisten Administrasi.

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah dipimpin oleh Kepala Badan, Kepala Kantor, atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala Badan, Kepala Kantor, atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I. Lembaga Teknis Daerah, meliputi;

1. Badan Kepegawaian Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana

4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Kantor Arsip Daerah
9. Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. Dinas Daerah, meliputi;

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Kopreasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10. Dinas Pertanian dan Perikanan
11. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
12. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Bupati. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Sekretaris Daerah karena kedudukannya, sebagai pembina pegawai negeri sipil di Kabupaten Ciamis.

III. Sekretariat Daerah, meliputi;

- I. Asisten Pemerintahan, yang terdiri dari;
 - a. Bagian Tata Pemerintahan
 - b. Bagian Hukum
 - c. Bagian Organisasi
- II. Asisten pembangunan, yang terdiri dari;
 - a. Bagian Perekonomian
 - b. Bagian Pengendalian Program
 - c. Bagian Kesejahteraan Sosial
- III. Asisten Administrasi, yang terdiri dari;
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Keuangan dan Sarana
 - c. Bagian Humas

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas:

2. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
3. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
4. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
5. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

IV. Sekretariat DPRD, meliputi :

- a. Bagian Umum

- b. Bagian Sarana dan Pembekalan
- c. Bagian Hukum dan Persidangan
- d. Bagian Keuangan

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan sebagaimana dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas tersebut juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

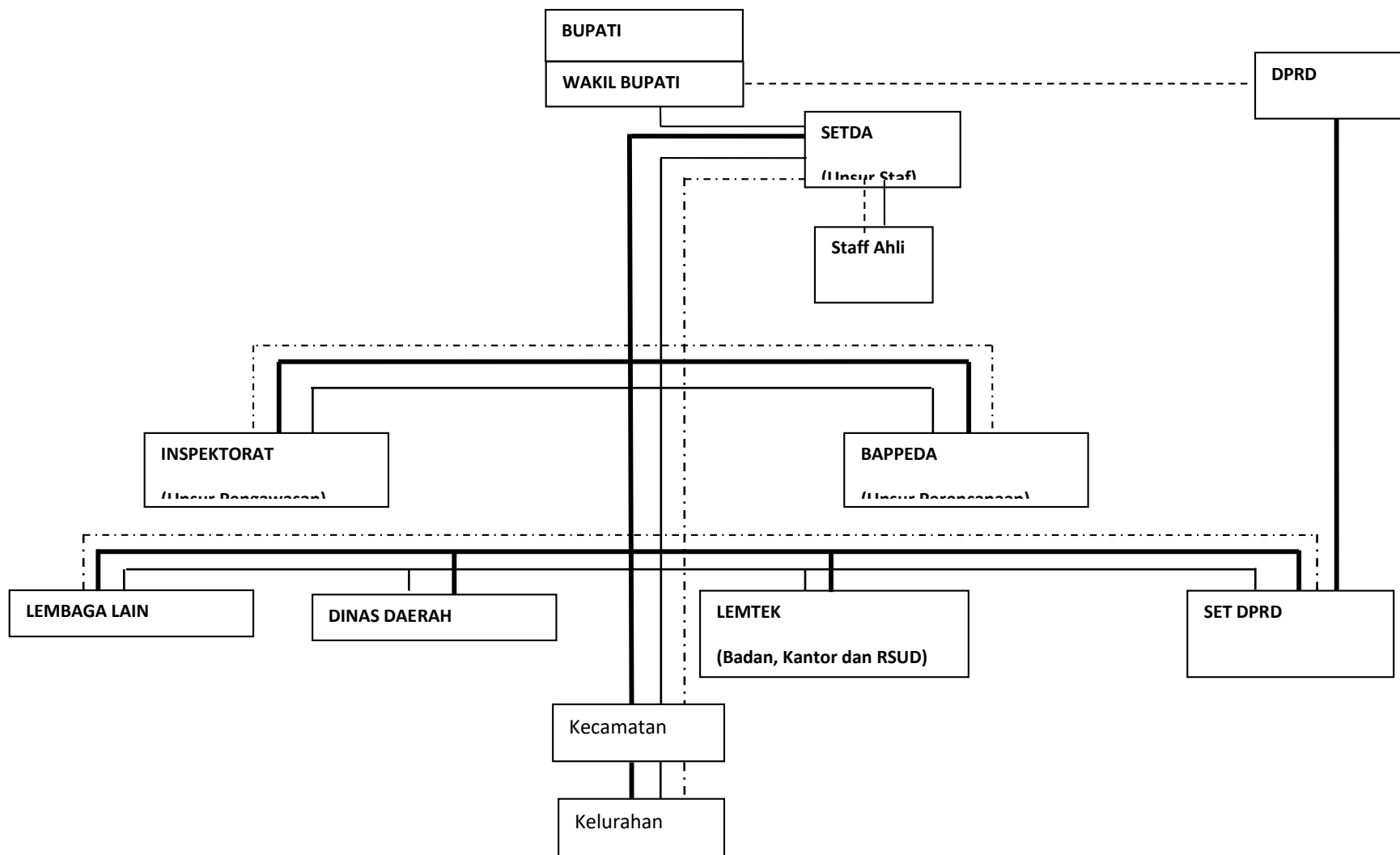
Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.

Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati. Selain tugas tersebut lurah mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Lurah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda. Berikut adalah gambar struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Ciamis.

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis



5.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian

Untuk mengukur tingkat kemandirian pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis diantaranya terdapat beberapa parameter yang digunakan yaitu kemampuan keuangan daerah yang meliputi derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, upaya fiskal dan kapasitas fiskal serta derajat kemandirian yaitu parameter untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah.

A. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis

Untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Ciamis terdapat beberapa variabel yang diperlukan diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Pengeluaran Daerah (TPD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), Sumbangan dari pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, jumlah penduduk Kabupaten Ciamis dan jumlah kecamatan yang berada di Kabupaten Ciamis.

1. Derajat Desentralisasi fiskal

Derajat desentralisasi fiskal merupakan derajat untuk mengukur persentase penerimaan daerah antara lain PAD, BHPBP, serta sumbangan pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah. Terdapat beberapa variabel yang digunakan untuk menganalisis derajat desentralisasi fiskal diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Sumbangan dari Pemerintah Pusat.

Salah satu perbandingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dapat dilihat berdasarkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD). Untuk lebih jelasnya mengenai derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Ciamis yang ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) dapat dilihat pada Tabel 4.7 dibawah ini

Tabel 4.7
Perbandingan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Penerimaan Daerah
Tahun 2010-2014

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Total Penerimaan Daerah (Rupiah)	Persentase Antara PAD dengan TPD (%)	Rata-Rata (%)
2010	63.800.280.473,00	730.532.107.220,00	8,73	10,01
2011	69.493.500.676,00	783.424.062.974,00	8,87	
2012	87.633.522.120,38	842.563.342.848,38	10,4	
2013	102.288.540.254,00	864.780.090.060,00	11,83	
2014	108.658.025.581,20	1.065.218.083.322,20	10,2	

Sumber : Analisis tahun 2015

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa derajat desentralisasi fiskal yang perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Darah (TPD) Kabupaten Ciamis pada tahun 2010-2015 berkisar 8,73% sampai dengan 11,83%, dengan rata-rata sebesar 10,01%, maka dapat dikatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Ciamis rendah sekali dan masih tergantung pada pemerintah pusat sekitar 89,99%. Ini berarti bahwa ketergantungan antara Kabupaten Ciamis dengan pemerintah pusat masih sangat tinggi, sehingga potensi yang terdapat di Kabupaten Ciamis perlu dikembangkan agar tidak terlalu mengandalkan bantuan dari pusat, sehingga Kabupaten Ciamis harus menggali potensi yang ada di setiap kecamatan.

Selanjutnya yaitu desentralisasi fiskal yang membandingkan antara bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan tingkat penerimaan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.8 dibawah ini :

Tabel 4.8
Perbandingan Antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Penerimaan Daerah Tahun 2010-2014

Tahun	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Rupiah)	Total Penerimaan Daerah (Rupiah)	Prosentase Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Penerimaan Daerah (%)	Rata-rata (%)
2010	46.522.799.486,00	730.532.107.220,00	6,37	6,42
2011	41.048.106.795,00	783.424.062.974,00	5,23	
2012	51.075.644.364,00	842.563.342.848,38	6,06	
2013	66.742.318.403,00	864.780.090.060,00	7,71	
2014	71.928.156.082,00	1.065.218.083.322,20	6,75	

Sumber : Analisis tahun 2015

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa perbandingan antara bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan total penerimaan daerah berkisar antara 5,23% sampai dengan 7,71%, dengan rata-rata sebesar 6,42%, ini berarti bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Ciamis rendah sekali dan menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap bagi hasil pajak dan bukan pajak yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi.

Selanjutnya yaitu menghitung desentralisasi fiskal dengan membandingkan antara sumbangan dari pusat yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah dengan tingkat penerimaan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.9 di bawah ini :

Tabel 4.9
Perbandingan antara Sumbangan Dari Pusat dengan
Total Penerimaan Daerah Tahun 2010-2014

Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Total Penerimaan Daerah (Rupiah)	Prosentase Sumbangan Dari Pusat dengan Total Penerimaan Daerah (%)	Rata-rata (%)
2010	694.912.671.048,00	733.381.107.220,00	94,75	93
2011	790.937.252.120,00	831.985.358.915,00	95,06	
2012	791.487.698.484,38	898.084.570.648,38	88,13	
2013	926.126.985.073,00	992.869.303.521,00	93,28	
2014	1.086.568.521.812,20	1.158.506.677.894,20	93,79	

Sumber : Analisis tahun 2015

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa derajat desentralisasi fiskal dengan melihat perbandingan antara Sumbangan dari Pusat dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten Ciamis pada tahun 2006-2010 berkisar antara 88,13% sampai dengan 95,06%, dengan rata-rata 93%, maka dapat dikatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Ciamis rendah sekali dan masih tergantung pada pemerintah pusat dibandingkan dengan penerimaan daerah sendiri yang hanya sebesar 7%.

2. Kebutuhan fiskal

Kebutuhan fiskal merupakan salah satu alat analisis untuk mengukur kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Semakin tinggi indeks, maka kebutuhan fiskal suatu daerah semakin besar.

Terdapat beberapa variabel untuk menentukan kebutuhan fiskal dalam mengukur kinerja kemampuan keuangan daerah, salah satu diantaranya yaitu jumlah pengeluaran Kabupaten Ciamis, jumlah pengeluaran Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Kabupaten Ciamis, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat. Adapun untuk menghitung standar kebutuhan fiskal di Kabupaten Ciamis yaitu dihitung dengan cara jumlah pengeluaran Provinsi Jawa Barat dibagi dengan jumlah penduduk serta dibagi dengan jumlah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.10 dibawah ini

Tabel 4.10
Standar Kebutuhan Fiskal Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013

Tahun	Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (Rp)	Jumlah Penduduk Prov. Jawa Barat (Jiwa)	Pengeluaran Per Kapita Provinsi Jawa Barat (Rp)	Jumlah Kabupaten /Kota	Standar Kebutuhan Fiskal (Rupiah)	Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat
2010	5.700.026.832.000,00	40.737.594	139.920,56	26	5.382	26
2011	6.048.094.310.000,00	41.483.729	145.794,30	26	5.607	26
2012	6.964.665.374.000,00	42.194.869	165.059,50	26	6.348	26
2013	6.185.132.000.000,00	42.693.951	144.871,39	26	5.572	26
2014	8.262.746.353.000,00	43.021.826	192.059,41	26	7.387	26

Sumber : Analisis tahun 2015

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata standar kebutuhan fiskal Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010-2015 mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 12,22%, dengan rata-rata standar kebutuhan fiskal sebesar Rp 6.059. Ini berarti bahwa rata-rata kebutuhan fiskal Provinsi Jawa Barat cukup tinggi, namun apabila dialokasikan ke setiap kabupaten/kota se-Jawa Barat maka standar kebutuhan fiskal tergolong rendah dalam memenuhi kebutuhan fiskal dalam lingkup provinsi.

Selanjutnya adalah menghitung indeks pelayanan publik Kabupaten Ciamis dengan cara membagi antara pengeluaran perkapita dengan standar kebutuhan fiskal Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya mengenai indeks pelayanan publik per kapita Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Tabel 4.11 di bawah ini.

Tabel 4.11
Indeks Pelayanan Publik Per Kapita Kabupaten Ciamis Tahun 2010-2014

Tahun	Pengeluaran Kab. Sumedang (Rp)	Jumlah Penduduk Kab. Sumedang (Jiwa)	Pengeluaran Per Kapita Kab. Sumedang (Rp)	Standar Kebutuhan Fiskal Prov. Jabar (Rp)	Indeks Pelayanan Publik	Rata-rata Indeks Pelayanan Publik
2010	680.253.107.768,00	1.045.823	650.447,65	5.382	12,08	13,18
2011	781.980.995.910,00	1.091.674	716.313,66	5.607	12,77	
2012	903.051.752.718,00	1.112.433	811.780,80	6.348	12,79	
2013	951.691.409.125,00	1.134.288	839.020,96	5.572	15,06	
2014	1.120.263.649.281,00	1.150.187	973.983,93	7.387	13,18	

Sumber : Analisis tahun 2015

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa indeks pelayanan publik di Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 2,27%. Telah diketahui bahwa rata-rata indeks pelayanan public Kabupaten Ciamis memiliki rata-rata sebesar 13,18%, ini berarti bahwa rata-rata indeks pelayanan publik di Kabupaten Ciamis sebesar 13 kali lebih kecil dari rata-rata indeks pelayanan publik Provinsi Jawa Barat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Ciamis belum dapat memenuhi pelayanan publik ke setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Ciamis terhadap kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Ciamis.

3. Kapasitas fiskal (*Fiscal capacity*)

Kapasitas fiskal merupakan alat analisis untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD dan danabagi hasil yang diserahkan kepada pemerintah daerah guna membiayai pendanaan daerah. Dengan penilaian, apabila kapasitas fiskal (PAD + dana bagi hasil) lebih besar dari pengeluaran (kebutuhan fiskal) maka potensi untuk mendapatkan PAD didaerah tersebut cukup bagus tanpa ada bantuan dari pemerintahpusat. Untuk menghitung kapasitas fiskal standar yaitu dengan cara membagi antara PDRB Per Kapita dengan jumlah kecamatan yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.12 di bawah ini.

Tabel 4.12
Kapasitas Fiskal Standar Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2015

Tahun	PDRB ADHK (Rp)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB Per Kapita (Rp/Jiwa)	Jumlah Kabupaten /Kota	Kapasitas Fiskal Standar (Rp)	Rata-rata Kapasitas Fiskal Standar (Rp)
2010	242.935.199.000.000,00	40.737.594	5.963.415	26	229.362,10	250.004,33
2011	257.535.975.000.000,00	41.483.729	6.208.120	26	238.773,85	
2012	274.180.307.830.000,00	42.194.869	6.497.954	26	249.921,30	
2013	290.180.021.060.000,00	42.693.951	6.796.748	26	261.413,38	
2014	302.629.559.340.000,00	43.021.826	7.034.326	26	270.551,01	

Sumber : Analisis tahun 2015

Dari Tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata kapasitas fiskal standar Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 250.004,00. Untuk lebih jelasnya mengenai kapasitas fiskal Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Tabel 4.13 di bawah ini.

Tabel 4.13
Kapasitas Fiskal Kabupaten Ciamis Tahun 2010-2015

Tahun	PDRB ADHK (Rp)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	PDRB Per Kapita (Rp/Jiwa)	Kapasitas Fiskal Standar Provinsi Jawa Barat (Rp)	Kapasitas Fiskal	Rata-rata Kapasitas Fiskal
2010	4.506.200.560.000,00	1.045.823	4.308.760,24	229.362,13	19	17
2011	4.694.276.210.000,00	1.091.674	3.300.071,46	238.773,85	14	
2012	4.911.883.030.000,00	1.112.433	4.415.441,68	249.921,30	18	
2013	5.136.819.720.000,00	1.134.288	4.528.673,25	261.413,38	17	
2014	5.381.581.990.000,00	1.150.187	4.678.875,69	270.551,01	17	

Sumber : Analisis tahun 2015

Dari Tabel 4.13 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata kapasitas fiskal Kabupaten Ciamis sebesar 17 kali dibandingkan dengan rata-rata kapasitas fiskal Provinsi Jawa Barat, maka masih terdapat selisih 9, diharapkan dapat menutup kekurangan keuangan melalui transfer dari pemerintah pusat atau menggali potensi setiap kecamatan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah yang lebih besar.

Untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis dapat dilihat dari pendapatan per kapita (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dibagi dengan jumlah penduduk). Apabila pendapatan per kapita lebih besar dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Eksisting, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis sudah sejahtera dan sebaliknya

apabila pendapatan per kapita lebih kecil Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Konstan maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis masih rendah. Untuk lebih jelasnya mengenai Pendapatan Per Kapita Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Tabel 4.14 di bawah ini.

Tabel 4.14
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Ciamis

No.	Tahun	Upah Minimum Regional (Rupiah/Bulan)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Produk Domestik Regional Bruto ADHK Eksiting Tahun 2010 (Rupiah)	Pendapatan Per Kapita (Rupiah/Tahun)	Pendapatan Per Kapita (Rupiah/Bulan)
1	2010	900.000	1.045.823	4.506.200.560.000,00	4.308.760,24	359.063
2	2011	900.000	1.091.674	4.694.276.210.000,00	3.300.071,46	275.005
3	2012	900.000	1.112.433	4.911.883.030.000,00	4.415.441,68	367.953
4	2013	900.000	1.134.288	5.136.819.720.000,00	4.528.673,25	377.389
5	2014	900.000	1.150.187	5.381.581.990.000,00	4.678.875,69	389.906

Sumber : Analisis tahun 2015

Dari Tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Ciamis sebesar Rp 900.000,-. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Ciamis sebesar Rp 117.773.252/tahun atau Rp 9.814.438/bulan. Adapun pendapatan per kapita yang paling tinggi yaitu Kecamatan Rancakalong sebesar Rp 14.889.798/tahun atau Rp 1.240.817/bulan, sedangkan kecamatan yang memiliki pendapatan per kapita paling kecil yaitu Kecamatan Cisitu sebesar Rp 486.696/tahun atau Rp 44.058/bulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis cukup tinggi karena upah minimum regional di belum mencukupi tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Kesejahteraan masyarakat berusaha dicapai oleh pemerintah melalui pembangunan. Dengan pembangunan di berbagai sektor, diharapkan akan meningkatkan output, dengan demikian terjadi peningkatan pendapatan perkapita.

D. Upaya Fiskal/posisi fiskal

Upaya fiskal merupakan indikator/rasio yang digunakan adalah dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB. Rasio ini bertujuan untuk melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Untuk menghitung upaya fiskal di Kabupaten Ciamis dengan cara menghitung rata-rata proporsi PAD setiap

tahunnya dibandingkan dengan rata-rata proporsi PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan PDRB Atas Harga Berlaku. Untuk lebih jelasnya mengenai upaya fiskal di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Tabel 4.15 di bawah ini :

Tabel 4.15
Upaya Fiskal Kabupaten Ciamis Tahun 2010-2014

No.	Tahun	PAD (Rp.)	Proporsi (%)	PDRB ADHK (Rp.)	Proporsi (%)	PDRB ADHB (Rp.)	Proporsi (%)
1	2010	63.800.280.473,00	-	4.506.200.560.000,00	-	7.048.210.760.000,00	-
2	2011	69.493.500.676,00	8,92	4.694.276.210.000,00	4,17	8.066.643.340.000,00	14,45
3	2012	87.633.522.120,38	26,1	4.911.883.030.000,00	4,63	9.034.570.570.000,00	11,99
4	2013	102.288.540.254,00	16,7	5.136.819.720.000,00	4,58	10.300.942.440.000,00	14,02
5	2014	108.658.025.581,20	6,22	5.381.581.990.000,00	4,77	11.188.167.530.000,00	8,61
Rata-Rata/Jumlah			14,49	24.630.761.510.000,00	4,53	45.638.534.640.000,00	12,27

Sumber : Analisis tahun 2015

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

- Elastisitas PAD terhadap PDRB (harga konstan) = $14,49/4,53 = 3,20$
- Elastisitas PAD terhadap PDRB (harga berlaku) = $14,49/12,27 = 1,18$

Dapat diketahui bahwa dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, laju pertumbuhan PDRB sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD yaitu apabila PDRB naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 3,20% setiap tahunnya. Akan tetapi jika menggunakan atas dasar harga berlaku maka hasilnya inelastis artinya bahwa pertumbuhan PDRB tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Ini berarti bahwa untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Ciamis dilakukan dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, karena setiap tahunnya mengalami peningkatan PAD, sehingga dapat meningkatkan Potensi investasi di Kabupaten Ciamis dengan cara meningkatkan beberapa Potensi yang ada di setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Ciamis.

B. Kemampuan Keuangan Per Kecamatan di Kabupaten Ciamis

Selain menganalisis kemampuan keuangan dalam lingkup makro yaitu Kabupaten Ciamis, diperlukan pula untuk menganalisis kemampuan keuangan per kecamatan, hal ini dilakukan agar dapat diketahuinya tingkat kemandirian per kecamatan. Dimana untuk menganalisis kemampuan keuangan per kecamatan di Kabupaten Ciamis maka parameter yaitu kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya fiskal.

Adapun parameter yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal di kecamatan tersebut, maka harus diketahui terlebih Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kecamatan tersebut, jumlah penduduk di kecamatan tersebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kecamatan dan jumlah desa yang berada di Kecamatan, yang selanjutnya akan menghasilkan kapasitas fiskal standar.

Untuk menghitung kapasitas fiskal, dapat diperoleh dari jumlah PDRB Per Kapita kecamatan tersebut dengan kapasitas fiskal standar, namun sebelum menghitung kapasitas fiskal terlebih dahulu menghitung PDRB Per Kapita dibagi dengan jumlah desa yang ada di kecamatan tersebut.

Untuk menghitung kebutuhan fiskal di maka harus diketahui terlebih dahulu jumlah pengeluaran per kecamatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan, jumlah penduduk di dan jumlah desa yang berada di kecamatan tersebut. Untuk menghitung standar kebutuhan fiskal, dapat diperoleh dari hasil jumlah pengeluaran kecamatan dibagi dengan jumlah penduduk kecamatan tersebut dan dibagi dengan jumlah desa yang ada di kecamatan tersebut. Untuk menghitung upaya fiskal di Kecamatan variabel yang dibutuhkan yaitu PAD kecamatan tersebut serta PDRB kecamatan tersebut Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku. Untuk menghitung upaya fiskal, dapat diperoleh dari elastisitas PAD dibagi dengan PDRB baik itu PDRB Atas Dasar Harga Konstan maupun atas dasar harga berlaku. Untuk lebih jelasnya mengenai kemampuan keuangan setiap kecamatan di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Tabel 4.16 dibawah ini :

Tabel 4.16
Kemampuan Keuangan Per Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2014

No.	Nama Kecamatan	SKF Kab. Ciamis	IPP	KFS Kab. Ciamis	FC	Proporsi PAD Terhadap PDRB ADHK (%)	Proporsi PAD Terhadap PDRB ADHB (%)
1	Banjarsari	37.460,92	0,32	270.551,01	24	0,012482	0,000125
2	Lakbok	37.460,92	0,44	270.551,01	27	0,00004	0,00002
3	Pamarican	37.460,92	0,53	270.551,01	16	0,000086	0,000042
4	Cidolog	37.460,92	1,11	270.551,01	7	0,000229	0,000101
5	Cimaragas	37.460,92	0,7	270.551,01	12	0,000208	0,000096
6	Cijeungjing	37.460,92	0,89	270.551,01	14	0,000105	0,000051
7	Cisaga	37.460,92	0,35	270.551,01	47	0,000102	0,000048
8	Tambaksari	37.460,92	0,44	270.551,01	25	0,000174	0,000084
9	Rancah	37.460,92	1,08	270.551,01	8	0,000276	0,000123
10	Rajadesa	37.460,92	0,87	270.551,01	21	0,000078	0,000037

11	Sukadana	37.460,92	1,07	270.551,01	9	0,000116	0,000052
12	Ciamis	37.460,92	0,79	270.551,01	17	0,015412	0,007364
13	Cikoneng	37.460,92	1,04	270.551,01	14	0,011251	0,005332
14	Cihaurbeuti	37.460,92	0,67	270.551,01	6	0,000227	0,000043
15	Sadananya	37.460,92	0,62	270.551,01	6	0,000316	0,000144
16	Cipaku	37.460,92	0,91	270.551,01	13	0,00013	0,000061
17	Jatinagara	37.460,92	0,95	270.551,01	2	0,000581	0,00002
18	Panawangan	37.460,92	0,72	270.551,01	20	0,000163	0,000077
19	Kawali	37.460,92	1,05	270.551,01	21	0,000151	0,000072
20	Panjalu	37.460,92	0,85	270.551,01	16	0,000104	0
21	Panumbangan	37.460,92	0,56	270.551,01	17	0,000217	0,000106
22	Sindangkasih	37.460,92	1,26	270.551,01	10	0,000114	0,00005
23	Baregbeg	37.460,92	0,88	270.551,01	17	0,007051	0,003354
24	Lumbung	37.460,92	0,98	270.551,01	7	0,00025	0,000114
25	Purwadadi	37.460,92	1,24	270.551,01	33	0,00011	0,000234
26	Sukamantri	37.460,92	2,03	270.551,01	8	0,000344	0,000156

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2015

Keterangan : SKF (Standar Kebutuhan Fiskal); IPP (Indeks Pelayanan Publik);KFS (Kapasitas Fiskal Standar); FC (Fiscal Capacity)

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas mengenai kemampuan keuangan yang dirinci per kecamatan di Kabupaten Ciamis, maka kebutuhan fiskal dilihat berdasarkan indeks pelayanan publik per kapita (IPP) yaitu Kecamatan Sukamantri sebesar 2,03 sedangkan yang paling kecil yaitu Kecamatan Banjarsari sebesar 0,32. Untuk kapasitas fiskal yang paling besar terdapat di Kecamatan Ciamis Selatan sebesar 47, sedangkan kapasitas fiskal yang paling kecil terdapat di Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Sadananya sebesar 6. Upaya fiskal merupakan proporsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku. Adapun untuk proporsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan, kecamatan yang paling besar proporsinya yaitu Kecamatan Banjarsari sebesar 0,012482%, dan yang paling kecil yaitu Kecamatan Rajadesa sebesar 0,00078%. Untuk proporsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, kecamatan yang paling besar proporsinya yaitu Kecamatan Cikoneng sebesar 0,005332%, dan kecamatan yang paling kecil proporsinya yaitu Kecamatan Laktok sebesar 0,000078%.

C. Derajat Kemandirian Daerah Kabupaten Ciamis

Kemandirian daerah adalah kemampuan pendapatan daerah seperti PAD, BHPBP dalam membiayai pengeluaran daerah seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Menurut Halim (2001) parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian daerah adalah derajat kemandirian daerah, yaitu parameter untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai variabel derajat kemandirian di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Tabel 4.17 dibawah ini

Tabel 4.17
Variabel Derajat Kemandirian Kabupaten Ciamis Tahun 2010-2014

Tahun	PAD	Total Pengeluaran Daerah	Pengeluaran Rutin	BHPBP	Total Penerimaan Daerah
2010	63.800.280.473,00	680.253.107.768,00	560.086.692.914,00	46.522.799.486,00	733.381.107.220,00
2011	69.493.500.676,00	781.980.995.910,00	672.123.810.642,00	41.048.106.795,00	831.985.358.915,00
2012	87.633.522.120,38	903.051.752.718,00	623.325.582.010,00	51.075.644.364,00	898.084.570.648,38
2013	102.288.540.254,00	951.691.409.125,00	678.383.685.259,00	66.742.318.403,00	992.869.303.521,00
2014	108.658.025.581,20	1.120.263.649.281,00	1.015.190.006.999,00	71.928.156.082,00	1.158.506.677.894,20

Sumber : Analisis Tahun 2015

Dari beberapa variabel diatas maka akan dihasilkan derajat kemandirian Kabupaten Ciamis sehingga dapat diketahui kemandirian pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis. Untuk lebih jelasnya data dilihat pada Tabel 4.18 dibawah ini

Tabel 4.18
Derajat Kemandirian Kabupaten Ciamis Tahun 2010-2014

Tahun	PAD/Total Pengeluaran Daerah	PAD/Pengeluaran Rutin	PAD+Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/ Total Pengeluaran Daerah	PAD+Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/ Total Penerimaan Daerah	RataRata (%)
2010	9,38	11,39	19,7	15,04	14,36
2011	8,89	10,34	16,45	13,29	
2012	9,7	14,06	22,25	15,45	
2013	10,75	15,08	24,92	17,02	
2014	9,7	10,7	17,79	15,59	
Rata-Rata	9,68	12,31	20,22	15,28	

Sumber : Analisis Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 4.18 diatas untuk menghitung derajat kemandirian daerah yang *pertama* yaitu membandingkan antarpenerimaan asli daerah dibagi dengan total pengeluaran daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan, sehingga diperoleh rata-rata sebesar 9,68%. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Ciamis dapat dikatakan belum mandiri dalam hal kemampuan keuangan daerah karena peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah yang dilihat

berdasarkan pada pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis karena terlalu banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sendiri dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh Kabupaten Ciamis setiap tahunnya.

Kedua yaitu membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja modal dan lain sebagainya diperoleh hasil rata-rata per tahunnya sebesar 12,31%, ini berarti bahwa pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah, sehingga Kabupaten Ciamis masih belum mampu mandiri karena banyaknya pengeluaran rutin setiap tahunnya yang perlu dikeluarkan sedangkan pendapatan daerah yang diterima kurang.

Ketiga yaitu membandingkan antara pendapatan asli daerah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan total pengeluaran daerah, dimana diperoleh hasil rata-rata per tahunnya sebesar 20,22%, ini berarti bahwa selain dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak juga membantu untuk meningkatkan kemampuan keuangan di Kabupaten Ciamis, namun ini berarti bahwa Kabupaten Ciamis masih tergantung pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan belum dapat mengembangkan potensi yang ada di setiap kecamatan yang dapat memberikan pendapatan yang cukup besar apabila setiap kecamatan yang memiliki potensi yang cukup signifikan dalam hal menambah pendapatan agar tidak tergantung kepada pemerintah pusat.

Keempat yaitu membandingkan antara pendapatan asli daerah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan total penerimaan daerah, diperoleh hasil dengan rata-rata per tahunnya sebesar 15,28%. Ini berarti bahwa Kabupaten Ciamis masih menggantungkan terhadap pemerintah pusat dalam hal keuangan daerah karena Pendapatan Asli Daerah pun tidak dapat menutupi kekurangan dari keuangan daerah tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian di Kabupaten Ciamis hanya sebesar 14,36% (hasil rata-rata dari hasil perhitungan keempat rumus kemandirian daerah), maka dapat dikatakan Kabupaten Ciamis masih belum mampu untuk memenuhi kemampuan keuangannya sendiri karena masih bergantung pada pemerintah pusat sebesar 85,64%. Ini berarti bahwa Kabupaten Ciamis harus menggali potensi setiap kecamatan untuk meningkatkan kemandiriannya.

D. Potensi Peningkatan Kemandirian di Kabupaten Ciamis

Untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis, terdapat beberapa Potensi yang dapat ditingkatkan berdasarkan pada rencana pola

pemanfaatan ruang yang mengacu pada draft RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031, dimana setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Ciamis terdapat beberapa Potensi investasi yang harus dikembangkan untuk dapat meningkatkan kemandirian di Kabupaten Ciamis.

Terdapat beberapa Potensi-Potensi kegiatan di Kabupaten Ciamis dengan mengacu pada draft RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 diantaranya yaitu berupa potensi-potensi setiap kecamatannya untuk menghasilkan objek yang yang digali pendapatannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.19 dibawah ini

Tabel 4.19
Potensi-Potensi Kegiatan Menurut RTRW Kabupaten Ciamis

No	Potensi Kegiatan	Objek Potensi Kegiatan	Kecamatan	Potensi kegiatan
1	Bahan galian golongan C	Batu andesit, tanah urug	Banjarsari	Pajak mineral
		Batu andesit, tanah urug	Lakbok	logam dan bukan
		Batu andesit, tanah urug	Pamarican	logam
		Batu andesit	Cidolog	
		Lempung	Cimaragas	
		Batu andesit, tanah urug	Cijeungjing	
		Batu andesit, lempung	Cisaga	
		Batu andesit, kaolin, bentonit	Tambaksari	
		Batu andesit, pasir sungai, batu gamping, pasir	Rancah	
		Pasir sungai, tanah urug	Rajadesa	
		Pasir darat, tanah urug, pasir sungai, lempung	Sukadana	
		Batu andesit, lempung, kaolin	Ciamis	
		Batu andesit, lempung, pasir darat, tras	Cikoneng	
		Batu andesit, lempung, pasir darat, tras	Cihaurbeuti	
		Batu andesit, tanah urug, lempung	Sadananya	
		Pasir darat	Cipaku	
		Batu andesit, kaolin, bentonit, lempun	Jatinagara	
		atu andesit, pasir darat, bentonit, tanah liat, pasir Sungai	Panawangan	
		Batu andesit, pasir, bentonit, pasir darat, lempung	Kawali	
2	Pariwisata	Agropolitan (minat khusus)	Cihaurbeuti	Pajak hotel, Villa, bungalow
			Panjalu	Pajak restoran
			Panumbangan	Pajak hiburan
			Sindangkasih	Pajak reklame

			Baregbeg	Pajak parkir
			Lumbung	
			Purwadadi	
			Sukamantri	
		objek wisata budaya makam Petilasan Raja-Raja Galuh	Cijeungjing	
			Ciamis	
			Kawali	
		objek wisata budaya sunda wiwitan	Cisaga	
		wisata minat khusus curug	Panjalu	
3	Edukasi & Event Organizer	Universitas dan Perguruan Tinggi	Ciamis, Baregbeg	Pajak hotel, Rumah Kost komunal
		Bumi Perkemahan	Cikoneng	Pajak restoran
		Rencana Galeri dan rest area	Cihaurbeuti	Pajak hiburan
		Hiburan dan wisata waterboom (Icakan)	Baregbeg	Pajak reklame
		Hiburan dan wisata waterboom(sukahaji)	Sindangkasih	Pajak parkir
		islamic centre & convention centre	Ciamis	
4	Agriculture	Peternakan Besar > 200 ekor	Seluruh Kecamatan	
		Peternakan Kecil > 2000 ekor	Seluruh Kecamatan	
		Perkebunan dan Pertanian >5 Ha	Seluruh Kecamatan	

Sumber : Analisis Tahun 2015

Dengan melihat Tabel 4.19 diatas makadapat dikatakan bahwa PotensiPotensi kegiatan menurut RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031, terdiri dari potensi bahan galian golongan C dimana akan menghasilkan potensi kegiatan berupa pajak mineral logam dan bukan logam yang tersebar di 19 kecamatan yang berada di Kabupaten Ciamis. Potensi kegiatan lainnya yaitu berupa pariwisata dimana terdapat beberapa objek pariwisata yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Ciamis dimana nantinya akan menghasilkan potensi kegiatan berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. Maka dari itu, setiap Potensi-Potensi kegiatanyang tercantum dalam RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 akan menghasilkanbeberapa pendapatan yang dapat digali dan memiliki potensi yang cukup signifikan untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Ciamis.

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sebagai wujud desentralisasi pembangunan di Kabupaten Ciamis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ciamis dilihat dari desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal, kebutuhan dan upaya fiskal masih tergolong rendah dan belum mampu untuk membiayai rumah tangganya sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa belum optimalnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Tingkat kemandirian Kabupaten Ciamis rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, dimana pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak mampu melaksanakan otonomi daerahnya sendiri.
3. Potensi untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis, dilihat berdasarkan pada rencana pola ruang di Kabupaten Ciamis tahun 2011-2031 berdasarkan pada struktur ruang yang dibagi menjadi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, yang akan menghasilkan potensi yang berbeda-beda setiap kecamatannya, yang dapat meningkatkan pendapatan di Kabupaten Ciamis tanpa tergantung pada pemerintah pusat.
4. Pemerintah Kabupaten Ciamis harus siap mengurus rumah tangganya sendiri, karena pada tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan akan diserahkan langsung kepada pemerintah daerah, sehingga pendapatan yang akan dihasilkan akan bertambah tanpa tergantung dari pemerintah pusat dan diharapkan tingkat kemandirian akan mencapai 75%.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa rekomendasi antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Ciamis terus melakukan penggalian dan pengembangan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) karena kenaikan PAD merupakan kunci kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu meningkatkan penerimaan sumber daya dan penerimaan Kabupaten Ciamis dengan meningkatkan penerimaan dari perpajakan dan retribusi daerah, selain itu juga pemerintah Kabupaten Ciamis perlu mengoptimalkan kinerja dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) agar dapat lebih menyokong PAD (Pendapatan Asli Daerah).

2. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Ciamis dari segi kemampuan keuangan daerah masih kurang, untuk itu perlu diupayakan peningkatan kemandirian baik secara ekstentifikasi maupun instentifikasi agar dapat digali secara optimal sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Ciamis.
3. Perlu adanya sumber daya yang potensial yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara mengembangkan potensi setiap kecamatan sehingga potensi untuk mendapatkan investasi untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dengan melihat potensi investasi setiap kecamatannya berdasarkan pada rencana pola ruang tahun 2011-2031.
4. Penentuan harga jual tanah sebaiknya mengacu pada rencana pola ruang yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis, agar objek yang dapat digali menghasilkan pendapatan berdasarkan pada jenis pajak yang akan ditarik dari masyarakat berdasarkan pada jenis pajaknya. Sebaiknya Produk Domestik Regional Bruto mengacu pada standar Upah Minimum Regional di Kabupaten Ciamis dan jumlah penduduk karena untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, 1997. Otonomi Daerah dan Kinetja Aparatur Pemerintah daerah Tingkat II, Jurnal Ekonomi Pembangunan, No 1, Vol 2, FE UII, Yogyakarta
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: PT Indeks
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN
- Halim, Abdul. 2001. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Mangkoesubroto, Guritno. 1994. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia Substansi dan Urgensi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo.2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV Andi
- Musgrave dan Musgrave.1980. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: PT Erlangga.
- Prasojo, Eko. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 1998. *Ekonomika Publik*. Yogyakarta: PT BPF
- Riyadi dan Supriady. 2006. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung : Mandar Maju
- Siagian, Sondang. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: CV Andi
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syamsudin, Haris. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Tubagus Rully Ferdian, 2000, Menyoal Desentralisasi Fiskal yang Adil, Jurnal Ekonomi Pembangunan, No 2, Vol 5, FE WI, Yogyakarta
- Yani, Ahmad.2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
-Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
-Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
-Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
-Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan
-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas

Lampiran 2. Biodata ketua dan anggota

Lampiran 3. Surat pernyataan kesediaan pendanaan penelitian FISIP Universtias Galuh

Lampiran 1. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas

NO	NAMA/NIDN	INSTANSI ASAL	BIDANG ILMU	ALOKASI WAKTU PENELITIAN	TUGAS DALAM PENELITIAN
1.	Deden Syarifudin, ST., MT/0430057604	Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung	Perencanaan Wilayah dan Kota	7 Jam/ Minggu	<p>Ketua Peneliti bertugas menjabarkan ruang lingkup kegiatan ke dalam langkah-langkah operasional sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, mengkoordinir dan memberi petunjuk kepada anggota, serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan semua proses yang dilakukan selama penelitian berlangsung.</p> <p>Keua Peneliti bertanggung jawab dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Memimpin dan mengkoordinasikan tim pelaksana penelitian. ■ Menjabarkan dan mendefinisikan ruang lingkup kegiatan dan materi yang akan di kerjakan dalam penelitian. ■ Merumuskan rencana dan program kerja rinci pelaksanaan pekerjaan serta mendistribusikannya kepada Anggota Peneliti dan Assisten Peneliti sesuai dengan bidang keahliannya. ■ Melakukan pemantauan terhadap semua pelaksanaan pekerjaan baik di studio maupun di lapangan sehingga kemajuan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. ■ Memimpin tim pelaksana dalam setiap diskusi baik internal maupun dengan pemerintah daerah setempat. ■ Melakukan survai lapangan dan pengumpulan data. ■ Menyusun naskah akademik untuk diterbitkan dan diseminarkan di forum nasional. ■ Merancang dan menentukan model terpilih bersama-sama dengan anggota peneliti.
2.	Aan Anwar Sihabudin, SH., S.Ip., M.Si / 0430077002	Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis	Ilmu Pemerintahan	6 Jam/ Minggu	<p>Berikut merupakan tugas dan kewajiban anggota peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Membantu ketua peneliti dan bekerja sama dengan anggota tim lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan keahlian dalam bidang ilmu pemerintahan . ■ Bersama anggota peneliti lain menyusun metoda analisis, rencana kerja dan kerangka laporan. ■ Melakukan survai dan pengumpulan data. ■ Melakukan analisis dalam dalam bidang ilmu pemerintahan . ■ Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian sesuai dengan bidang hukum dan ilmu pemerintahan pemerintahan ■ Menyusun naskah akademik untuk diterbitkan dan diseminarkan di forum nasional
3.	Elin Herlina, S.Pd., MM. / 0401087902	Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis	Manajemen	6 Jam/ Minggu	<p>Berikut merupakan tugas dan kewajiban anggota peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Membantu ketua peneliti dan bekerja sama dengan anggota tim lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan keahlian dalam bidang ilmu pemerintahan . ■ Bersama anggota peneliti lain menyusun metoda analisis, rencana kerja dan kerangka laporan. ■ Melakukan survai dan pengumpulan data. ■ Melakukan analisis dalam dalam bidang ilmu pemerintahan . ■ Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian sesuai dengan bidang hukum dan ilmu pemerintahan pemerintahan ■ Menyusun naskah akademik untuk diterbitkan dan diseminarkan di forum nasional maupun Internasional`
Pelibatan Mahasiswa					
4.	Rizal dan Abdussalam	Silmi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Pemerintahan	tentatif	<p>Berikut merupakan tugas dan kewajiban anggota peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bersama anggota peneliti membantu menyusun laporan. ■ Membantu melakukan survai dan pengumpulan data.

Lampiran 2. Biodata ketua dan anggota

Biodata **PENGUSUL**
PENDANAAN PENELITIAN FAKULTAS TEKNIK BATCH 2
(Ketua)

I. IDENTITAS DIRI

1.1	Nama Lengkap	:	Deden Syarifudin, ST., MT.
1.2	Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli/ III b Penata Muda Tk. I
1.3	NIK/NIDN	:	151 103 47/0430057604
1.4	Tempat dan Tanggal Lahir	:	Tasikmalaya, 30 Mei 1976
1.5	Alamat Rumah	:	<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan Adhi Pura Tahap 1. Jl. Azalea No. 18 Kecamatan Gedebage. Kota Bandung. • Jl. Rancawiru No. 205 D, RT. 02 RW. 07 Dsn. Pasirkadu Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. 46251.
1.6	Nomor Telepon	:	-
1.7	Nomor Hand Phone	:	0815 7272 7482
1.8	Alamat Kantor	:	Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung Jl. Dr. Setiabudhi No 193 Bandung 04 RW 15 Bandung 40133
1.9	Nomor Telepon/Fax	:	022-2013090
1.10	Alamat e-mail	:	dden.syar@gmail.com
1.11	Lulusan yang telah dihasilkan	:	S1 Sarjana Teknik (14 Orang) sebagai pembimbing pembantu
1.12	Mata Kuliah yang diampu	:	1. Metoda Analisis Perencanaan 1 (3 SKS)
			2. Metoda Analisis Perencanaan 2 (3 SKS)
			3. Metodologi Penelitian (3 SKS)
			4. Perencanaan Perdesaan (2 SKS)
			5. Tugas Akhir/Proyek Akhir

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1	Program :	S1	S2
2.2	Nama PT	Universitas Pasundan Bandung	Institut Teknologi Bandung
2.3	Bidang Ilmu	Teknik Planologi	Magister Studi Pembangunan
2.4	Tahun Masuk	1995	2006
2.5	Tahun Lulus	2003	2008
2.6	Judul Skripsi/Tesis	Identifikasi Potensi Lansekap sebagai Dasar Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Ciamis	Strategi Pengembangan Desa Tertinggal Wilayah Darat dan Wilayah Pesisir dalam Perspektif Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia : Wilayah Studi Kabupaten Ciamis
2.7	Pembimbing	1. Usup Soemantri Dipl. Ing	Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI
		2. Zulphiniar Priyandoko, Ir., MT.	

III. PENGALAMAN PENELITIAN

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp.)
1.	2008	Model Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Darat Berbasis Sistem Informasi Geografis di Wilayah Kabupaten Ciamis (Ketua)	Penelitian Dosen Muda DP2M-Ditjen Dikti 2007	10
2.	2008	Analisis Kondisi Infrastruktur Desa Tertinggal dalam perspektif Penanggulangan Kemiskinan : Wilayah Studi Kabupaten Ciamis (Anggota)	Penelitian Dosen Muda DP2M-Ditjen Dikti 2007	10
3.	2009	Konsep dan Strategi Pengembangan Kabupaten Ciamis Bagian Utara dalam Perspektif Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah (Ketua)	RAPB Program Pasca Sarjana Universitas Galuh Ciamis Tahun 2009	7.5
4.	2009	Analisis Potensi Akademik Calon Mahasiswa Program Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Galuh Ciamis (Anggota)	RAPB Program Pasca Sarjana Universitas Galuh Ciamis Tahun 2009	7.5
5.	2010	Analisis Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan [DPP] Sebagai Dasar Strategi Pengembangan Wilayah Dalam Konteks Ekonomi Interregional Perdesaan Dan Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah [PAD] Di Wilayah Selatan Kabupaten Ciamis (Ketua)	RAPB Program Pasca Sarjana Universitas Galuh Ciamis Tahun ke 1 dari 2 tahun	15
6.	2013	Analisis Tipologi Wilayah Sebagai Arahan Untuk Kebijakan Penyerasian Pengembangan Wilayah (Anggota)	RAPB Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Program studi Perencanaan Wilayah dan	5

			Kota Tahun 2013	
7.	2014	Model Kerjasama Antar Daerah (KAD) Perbatasan Antar Kabupaten/Kota Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat (Anggota)	Penelitian Hibah Bersaing DP2M-Ditjen Dikti 2014 tahun 1. (hanya tahun 1)	34,6
8.	2014	Kajian Tentang PADS Pada Sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB) Kota Bandung (Anggota Peneliti Lembaga Penelitian Universitas Pasundan)	Pendanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung	240
9.	2014	Kajian Akademik Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandung (Anggota Peneliti Lembaga Penelitian Universitas Pasundan)	Pendanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung	220

IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp.)
1.	2010	Sosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Konteks Musrenbang Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis (Ketua)	RAPB Jurusan Teknik Planologi	1,6
2.	2011	Potret Aspirasi Masyarakat Sebagai Dasar Penyusunan Rencana Induk Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis (<i>Metoda Focus Group Discussion</i> di Kecamatan Cihaurbeuti, Lumbung, Panjalu, Panumbangan dan Cihaurbeuti)	RAPB Jurusan Teknik Planologi	7

V. PUBLIKASI

No.	Tahun	Judul Penelitian	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
1.	2011	Analisis Kondisi Infrastruktur Desa Tertinggal dalam perspektif Penanggulangan Kemiskinan : Wilayah Studi Kabupaten Ciamis (main author)	Januari 2011 Volume 13 Nomor 1	Jurnal Pemasaran dan Sumberdaya Manusia ISSN : 1411-8661, Program Pascasarjana Universitas Galuh halaman 67-91.

2.	2014	Analisis Tipologi Wilayah Sebagai Arahan Untuk Kebijakan Penyerasian Pengembangan Wilayah (second author)	Bandung, Maret 2014 Volume 1 Nomor 1 Nomor 1	Jurnal Planologi Unpas ISSN : 2355-6110, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan Bandung. Halaman 59-74
3.	2014	Identifikasi Tipologi Wilayah Perbatasan Antar Kabupaten/Kota Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat (main author)	Bandung, Juli 2014 Volume 1 Nomor 2 Nomor 1	Jurnal Planologi Unpas ISSN : 2355-6110, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan Bandung. Halaman 75 - 100
4	2014	Isue-Isue Penyerasian Pembangunan Nasional dalam Penataan Ruang	No. 150/Edisi November 2014	Majalah Ilmiah Al-Mizan ISSN : 0852-839X . Universitas Pasundan Bandung. Halaman 28-34.
5	2014	Identifikasi Tipologi Wilayah Perbatasan Antar Kabupaten/Kota Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat (main author)	Proceeding Presentasi Hasil Penelitian Hibah Program Desentralisasi dan Hibah Internal Unpas Tahun 2014 Bidang Teknik	Proceeding Presentasi Hasil Penelitian Hibah Program Desentralisasi dan Hibah Internal Unpas Tahun 2014 Bidang Teknik. Venue : Kampus UNPAS IV, Setiabudhi. Tanggal 23 Desember 2014, ISBN 978-979-8793-80-6 Lemlit Unpas Halaman 145.

VI. PELATIHAN

No.	Tahun	Judul Penelitian	Durasi	Penyelenggara
1.	2013	Pelatihan Budidaya Kelinci Hias dan Kelinci Daging <i>enteupreuner expo-west java</i> 2013 sebagai peserta	Seminar Sehari	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Semua data yang diisi dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikoanya.

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi satu persyaratan dalam pengajuan Dana Penelitian Fakultas Teknik.

Bandung, Mei 2015
Pengusul,



Deden Syarifudin, ST., MT.

I. IDENTITAS DIRI

1.1	Nama Lengkap	:	Aan Anwar Sihabudin, SH.,S.IP., M.Si.
1.2	Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli/ III b Penata Muda Tk. I
1.3	NIPY	:	05. 311 277 0203
1.4	Tempat dan Tanggal Lahir	:	Ciamis, 30 Juli 1970
1.5	Alamat Rumah	:	Jl. Rancawiru No. 170, RT. 02 RW. 07 Dsn. Pasirkadu Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. 46251.
1.6	Nomor Telepon	:	-
1.7	Nomor Hand Phone	:	085221190806
1.8	Alamat Kantor	:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis Jl. RE. Martadinata No. 150 Ciamis 46251 04 RW 15 Bandung 40133
1.9	Nomor Telepon/Fax	:	0265-776790
1.10	Alamat e-mail	:	aan_anwar123@yahoo.com
1.11	Lulusan yang telah dihasilkan	:	-----
1.12	Mata Kuliah yang diampu	:	1. Kewarganegaraan (2 SKS)
			2. Pemerintahan Desa (2 SKS)
			3. Sosiologi Perdesaan (2 SKS)
			4. Bimbingan Skripsi

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1	Program :	S1	S2
2.2	Nama PT	Universitas Galuh Ciamis	Universitas Galuh Ciamis
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Manajemen Pemerintahan
2.4	Tahun Masuk	1994	2006
2.5	Tahun Lulus	2003	2008
2.6	Judul Skripsi/Tesis	Tinjauan Hukum Tentang Pelanggaran Garis Sempadan di Jalan MR. Iwa Kusumasomantri Kecamatan Ciamis Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 ayat 2 huruf a dan Pasal 14 ataat1 dan 2.	Pengaruh Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis.
2.7	Pembimbing	3. H. Otto Restu Fajar, SH.	1. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS.
		4. Dudung Mulyadi, SH.	2. Enas, SE., MM.

III. PENGALAMAN PENELITIAN

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp.)
1.	2009	Pengaruh Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa dalam Perspektif Manajerial	RAPB FISIP Unigal	1,8
2.	2009	Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Kasus pada Kantor Desa Kertaraharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis	RAPB FISIP Unigal	1,8

IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

V. PUBLIKASI

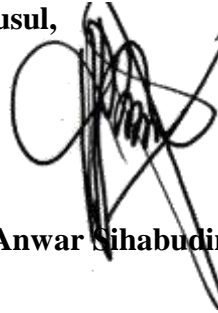
No.	Tahun	Judul Penelitian	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
1.	2011	Pengaruh Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Ciamis	Januari 2011 Volume 13 Nomor 1	Jurnal Pemasaran dan Sumberdaya Manusia ISSN : 1411-8661, Program Pascasarjana Universitas Galuh
2.	2010	Pengaruh Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa dalam Perspektif Manajerial	Volume 1 No. 1 Juni 2010	Majalah Ilmiah Cakrawala Galuh- LPPM Universitas Galuh (ISSN 2086- 8111)
3.	2010	Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Kasus pada Kantor Desa Kertaraharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis	Volume 1 No. 3 Desember 2010)	Majalah Ilmiah Cakrawala Galuh- LPPM Universitas Galuh (ISSN 2086- 8111)

Semua data yang diisi dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikoanya.

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi satu persyaratan dalam pengajuan Pendanaan Fakultas Teknik Unpas.

Ciamis, 18 Mei 2015

Pengusul,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping stroke that extends downwards and to the right.

Aan Anwar Sihabudin, SH., S.IP., M.Si.

Biodata **PENGUSUL**
PENDANAAN PENELITIAN FAKULTAS TEKNIK BATCH 2
(Anggota)

1. Identitas Peneliti

Nama : ELIN HERLINA, S.PD., MM.
 NIP/NIK : 03. 311 277 00 81/9904013230
 Tempat dan Tanggal Lahir : CIAMIS, 20 MEI 1977
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pendidikan Tertinggi : S-2
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Muda/III-B/01 April 2008
 Jabatan Fungsional/TMT : Asisten Ahli
 Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Ekonomi Manajemen
 Unit Kerja : Fakultas Ekonomi Universitas Galuh
 Alamat Kantor : Jl. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis
 Alamat : Jl. Rancawiru No. 205D RT.02 RW. 12 Desa petir
 Hilir Kecamatan baregbeg Ciamis 46251
 No Telepon Kantor : (0265) 772 060
 No Telepon/email : 081572727482/mrs.elinherlina@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan :

NO	STRATA	NAMA PT	GELAR	TAHUN TAMAT	BIDANG STUDI
1	S1	UPI Bandung	S.Pd	2000	Pendidikan Kimia
2	S2	Universitas Galuh Ciamis	M.M.	2005	Manajemen Sumberdaya Manusia

3. Award/Penghargaan

No.	Tahun	Penghargaan
1	1998	Penghargaan Mahasiswa Terbaik dan Penerima Beasiswa PT. Gudang Garam Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung
2.	2006	Penghargaan IPK Tertinggi Program Studi Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Galuh Ciamis

4. Pengalaman Pekerjaan

NO	INSTITUSI	JABATAN	PERIODE
1	UNIGAL Ciamis	Staff Keuangan (administrasi)	2000 – 2003
		Kasubag Keuangan (administrasi)	2003-2007
		Dosen Fakultas Ekonomi	2008 – Sekarang

5. Pengalaman Penelitian

NO	JUDUL	PEMBERI DANA	TAHUN
1.	Karakteristik Kerja, Iklim Kerja dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Dahana (Persero) Tasikmalaya	Fakultas Ekonomi Universitas Galuh	2007

2.	Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Pengalaman Pelatihan Manajemen Terhadap Motivasi dan Prestasi Kerja Pegawai (Studi Kasus Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel Tasikmalaya)	Fakultas Ekonomi Universitas Galuh	2008
3.	Elin Herlina Rekrutmen Sebagai Suatu Lingkup Kegiatan Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia	Fakultas Ekonomi Universitas Galuh	2011
4.	Deden Syarifudin, Elin Herlina Analisis Kemandirian Kinerja Kewilayahan Garut Selatan Menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) : Studi Pemekaran Daerah Garut Selatan di Kabupaten Garut	Fakultas Ekonomi Universitas Galuh	2011
5.	Nurdiana Mulyatini Dan Elin Herlina Pemetaan Karakteristik Dan Model Kerjasama Usaha Menengah Kecil Dan Mikro Dengan Usaha Besar Di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis	Ditjen Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2013	2013
6.			

6. Publikasi

No.	Tahun	Judul Penelitian	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
1.	2011	Elin Herlina Rekrutmen Sebagai Suatu Lingkup Kegiatan Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia	Januari 2011 Volume 13 Nomor 1	Jurnal Pemasaran dan Sumberdaya Manusia ISSN : 1411-8661, Program Pascasarjana Universitas Galuh, Hal 29-42
2.	2011	Deden Syarifudin, Elin Herlina Analisis Kemandirian Kinerja Kewilayahan Garut Selatan Menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) : Studi Pemekaran Daerah Garut Selatan di Kabupaten Garut	Mei 2011 Volume 13 Nomor 2	Jurnal Pemasaran dan Sumberdaya Manusia “ ISSN : 1411-8661 Program Pascasarjana Universitas Galuh. halaman 34-46
3.	2013	Nurdiana Mulyatini Dan Elin Herlina Pemetaan Karakteristik Dan Model Kerjasama Usaha Menengah Kecil Dan Mikro Dengan Usaha Besar Di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis	Maret Volume IV No.04	Jurnal Cakrawala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Galuh ISSN 2086-8111(http://www.unigal.ac.id)

4.	2013	Elin Herlina Pendidikan dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Model Kerjasama Usaha Menengah Kecil Dan Mikro Dengan Usaha Besar Di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis	Bulan April 2014, Volume 1 Nomor 1	Jurnal Ekonoligi Ilmu Manajemen ISSN : 2355-6099 Penerbit Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciams
----	------	--	---	---

Semua data yang diisi dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi syarat Pengajuan Pendanaan Penelitian Fakultas Teknik Universitas Pasundan.

Ciamis, 18 Mei 2015
Pengusul,

ttd

Elin Herlina, S.Pd., MM.

Lampiran 3. Surat pernyataan Kesanggupan Pendanaan Penelitian dari FISIP Universitas Galuh Ciamis



UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (S1) Terakreditasi
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46251

PERNYATAAN KESANGGUPAN PENDANAAN PENELITIAN
No. 0233/SP/AK/D/V/2015

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aan Anwar Sihabudin, SH., S.IP., M.Si

NIK/NIDN : 05. 311 277 0203/0430077002

Jabatan : Dekan FISIP Universitas Galuh Ciamis

Dengan ini menyatakan **bersedia membiayai kerjasama penelitian** dengan judul Arahan Peningkatan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Kabupaten Ciamis : Studi Pasca Pemekaran dengan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran yang di ketuai oleh :

Nama : Deden Syarifudin, ST., MT.

NIK/NIDN : 151 103 47/0430057604

Program Studi/Fakultas : Perencanaan Wilayah dan Kota/Teknik

Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan

Guna melaksanakan penelitian di Kabupaten Ciamis bersama dengan peneliti di program studi ilmu pemerintahan. Bersama ini pula kami sampaikan penelitian dengan judul dimaksud sesuai dengan kesepakatan ketua pengusul penelitian akan didanai sebesar Rp. 7.000.000,00 terbilang #tujuh juta rupiah#.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 18 Mei 2015


Aan Anwar Sihabudin, SH., S.IP., M.Si
NIK. 05. 311 277 0203

AS

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : **Arahan Peningkatan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Kabupaten Ciamis: Studi Pasca Pemekaran dengan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran**

Penulis Jurnal Ilmiah : **Deden Syarifudin¹⁾, Aan Anwar Sihabudin²⁾ Elin Herlina³⁾, 2015 *Kelompok*.**

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama Jurnal : -
 b. Nomor/Volume : -
 c. Edisi (bulan/tahun) : Desember 2015
 d. Penerbit : -
 e. Jumlah halaman : 78 Halaman

URL ARTIKEL : <http://repository.unpas.ac.id/>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : (beri \checkmark pada kategori yang tepat)

Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional tidak Terakreditasi
 Karya Ilmiah yang tidak dipublikasikan

Hasil penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir yang Diperoleh
	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional tidak Terakreditasi	Karya Ilmiah tidak Dipublikasi	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)				0,12	0,12
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				0,36	0,36
c. Kecakupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				0,36	0,36
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)				0,36	0,36
Total = (100%)				1,2	1,2

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

*temanya cukup baik kalau ide-membuatnya
 Komponen yang dinilai dipenuhi dengan baik*

Catatan :

Sangat sedih jika tidak diterbitkan, ini bisa memberikan insight bagi kaday ilmu

Bandung, 20 Mei / 2022

Reviewer 2

Dr. Ir. Firmansyah, MT.
 NIP : 151.102.90
 Unit Kerja : Fakultas Teknik

Reviewer 1

Dr. Ir. H. Budi Heri Pirngadi, MT.
 NIP : 151.101.16
 Unit Kerja : Fakultas Teknik

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : **Arahan Peningkatan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Kabupaten Ciamis: Studi Pasca Pemekaran dengan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran**

Penulis Jurnal Ilmiah : **Deden Syarifudin¹⁾, Aan Anwar Sihabudin²⁾ Elin Herlina³⁾, 2015 Kelompok.**

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama Jurnal : -
 b. Nomor/Volume : -
 c. Edisi (bulan/tahun) : Desember 2015
 d. Penerbit : -
 e. Jumlah halaman : 78 Halaman

URL ARTIKEL : <http://repository.unpas.ac.id/>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : (beri \checkmark pada kategori yang tepat)

Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional tidak Terakreditasi
 Karya Ilmiah yang tidak dipublikasikan

Hasil penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir yang Diperoleh
	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional tidak Terakreditasi	Karya Ilmiah tidak Dipublikasi	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)				0,12	0,12
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				0,36	0,36
c. Kecakupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				0,36	0,36
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)				0,36	0,36
Total = (100%)				1,2	1,2

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

Unsur-unsur penulisan karya ilmiah sudah sesuai

Bandung, 31 Juni / 2022

Reviewer 2

Dr. Ir. Firmansyah, MT.
 NIP : 151.102.90
 Unit Kerja : Fakultas Teknik

Reviewer 1

Dr. Ir. H. Budi Heri Pirngadi, MT.
 NIP : 151.101.16
 Unit Kerja : Fakultas Teknik

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : **Arahan Peningkatan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Kabupaten Ciamis: Studi Pasca Pemekaran dengan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran**

Penulis Jurnal Ilmiah : **Deden Syarifudin¹⁾, Aan Anwar Sihabudin²⁾ Elin Herlina³⁾, 2015 *Kelompok*.**

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : -
- b. Nomor/Volume : -
- c. Edisi (bulan/tahun) : Desember 2015
- d. Penerbit : -
- e. Jumlah halaman : 78 Halaman

URL ARTIKEL : <http://repository.unpas.ac.id/>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional
- Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
- Jurnal Ilmiah Nasional tidak Terakreditasi
- Karya Ilmiah yang tidak dipublikasikan

Hasil penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah				Nilai Akhir yang Diperoleh
	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional tidak Terakreditasi	Karya Ilmiah tidak Dipublikasi	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)				0,12	0,12
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				0,36	0,36
c. Kecakupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				0,36	0,36
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)				0,36	0,36
Total = (100%)				1,2	1,2

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

Bandung, 7 / Juni / 2022

Reviewer 2

Dr. Ir. Firmansyah, MT.
 NIP : 151.102.90
 Unit Kerja : Fakultas Teknik

Reviewer 1

Dr. Ir. H. Budi Heri Pirngadi, MT.
 NIP : 151.101.16
 Unit Kerja : Fakultas Teknik